



**PEMERINTAH
KALURAHAN TERONG**



**PERATURAN KALURAHAN TERONG
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA
NOMOR 4 TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DESA
TAHUN 2018-2024**

Sekretariat:

Jln. Patuk - Dlingo Km 7,5
Terong II, RT 04
Terong, Dlingo, Bantul, D.I Yogyakarta
55783

 terong-bantul.desa.id

 desa.terong@bantulkab.go.id

 0813 9143 7559

 0813 9143 7559

 @kalurahan terong





LURAH TERONG
KAPANEWON DLINGO KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN TERONG

NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA TAHUN 2018-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH TERONG,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 79 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pemerintah Desa menyusun Perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 8 (delapan);
 - b. bahwa Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2028 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018-2024 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum yang berlaku sehingga perlu lakukan perubahan;
 - c. bahwa sesuai Pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Begeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa menyebutkan bahwa Lurah Desa dapat merubah RPJM Desa dalam hal terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018-2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 5. Peraturan Menteri Dalam Begeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 10. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1958 Tentang Perubahan Batas Dan Nama Kapanewon-Kapanewon Imogiri, Gondowulung Dan Kotagede Dalam

Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta Seri A Nomor 10 tahun 1958);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
13. Peraturan Desa Terong Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018-2024 (Lembaran Desa Terong Tahun 2018 Nomor 4);

Dengan kesepakatan bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TERONG
Dan
LURAH TERONG**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN KALURAHAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA TAHUN 2018-2024**

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Desa Terong Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2018 – 2024 (Lembaran Desa Tahun 2018 Nomor 4) diubah sebagai berikut :

I. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan:

1. Kalurahan adalah Kalurahan Terong.
2. Lurah adalah Lurah Terong.
3. Kewenangan Kalurahan adalah kewenangan yang dimiliki kalurahan meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan, Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan, dan Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat kalurahan.
4. Pemerintahan kalurahan adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong kalurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kalurahan.
6. Peraturan kalurahan adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan kalurahan.

7. Pembangunan kalurahan adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat kalurahan.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa atau sebutan lain, selanjutnya disingkat RPJM Kalurahan, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Kalurahan untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun.
9. Rencana Kerja Pemerintah kalurahan, selanjutnya disebut RKP kalurahan, adalah penjabaran dari RPJM kalurahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja kalurahan, selanjutnya disebut APB kalurahan, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan kalurahan.
11. Badan Permusyawaratan kalurahan yang selanjutnya disingkat Bamuskal adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Musyawarah kalurahan atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan kalurahan, Pemerintah kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan kalurahan untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13. Kondisi Obyektif kalurahan adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di kalurahan, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.
14. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi kalurahan yang ditransfer melalui Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan, dan Pemberdayaan Masyarakat.
15. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut dengan ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota setelah dikurangi dana alokasi khusus.
16. Profil kalurahan adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter kalurahan yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, sertaper kembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi didesa.
17. Visi adalah suatu gambaran tantangan masa depan yang berisikan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh Lurah pada saat pencalonan berdasarkan keadaan obyektif kalurahan.
18. Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan oleh Lurah agar Visi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik atau merupakan penjabaran dari Visi sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien

19. Sustainable Development Goals yang selanjutnya disingkat SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan kalurahan untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
20. Pendataan kalurahan adalah proses penggalan, pengumpulan, pencatatan, verifikasi dan validasi data SDGs Desa, yang memuat data objektif kewilayahan dan kewargaan kalurahan berupa aset dan potensi aset kalurahan yang dapat didayagunakan untuk pencapaian tujuan Pembangunan kalurahan, masalah ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi penyusunan program dan kegiatan Pembangunan kalurahan, serta data dan informasi terkait lainnya yang menggambarkan kondisi objektif kalurahan dan masyarakat kalurahan.
21. Sistem Informasi Desa adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di kalurahan yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis Pembangunan Desa.
22. Peta Jalan SDGs Desa adalah dokumen rencana yang memuat kebijakan strategis dan tahapan pencapaian SDGs Desa sampai dengan tahun 2030.

II. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Perencanaan Pembangunan Kalurahan Terong Peiode 2018-2026 disusun dalam sebuah dokumen yang disebut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2018 – 2026 yang disingkat RPJM Kalurahan Tahun 2018-2026;
- (2) Dalam dokumen RPJM Kalurahan Tahun 2018-2026 dirinci berdasarkan bidang, program dan kegiatan yang menjadi prioritas;
- (3) Program Program dan kegiatan lainnya yang menjadi kebutuhan yang mendesak dalam tahun berjalan, akan diputuskan dalam Musrenbangkal yang diselenggarakan setiap tahun;
- (4) Keputusan hasil MusrenbangKAL sebagaimana ayat (3) selanjutnya dituangkan dalam RKP-Kalurahan.

III. Perubahan RPJM Kalurahan Terong Tahun 2018–2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

| | |
|---------|---|
| BAB I | : PENDAHULUAN |
| BAB II | : GAMBARAN UMUM KALURAHAN |
| BAB III | : VISI MISI |
| BAB IV | : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN |
| BAB V | : ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA |
| BAB VI | : PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATIF |

BAB VII : PENUTUP

Selanjutnya Sistematika Perubahan RPJM Kal Tahun 2018–2026 dijabarkan dalam dokumen yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 2

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Terong.

Ditetapkan di Terong
Pada tanggal 27 Mei 2025

LURAH TERONG,

ttd

SUGIYONO

Diundangkan di Terong
Pada tanggal 27 Mei 2025

CARIK TERONG,

ttd

VINA ARYANI

LEMBARAN KALURAHAN TERONG TAHUN 2025 NOMOR 2

NOREG PERATURAN KALURAHAN TERONG, KAPANEWON DLINGO
KABUPATEN BANTUL : 400.10.2.4/010/PRJ/DLG/V/2025

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n Carik Kalurahan Terong
u.b Kepala Urusan Pangripta



PENJELASAN ATAS
PERATURAN KALURAHAN TERONG
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA TAHUN 2018-2024

I. UMUM

Sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 79 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 4 tahun 2014 tentang Desa Pemerintah Kalurahan Terong telah menetapkan Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018-2024.

Pasca diberlakukannya RPJM Desa Terong tahun 2018-2024 terdapat dinamika perkembangan dalam peraturan perundang-undangan dan kebijakan lainnya yang mempengaruhi perencanaan dalam RPJM Desa tersebut.

Perkembangan dimaksud berupa terbitnya peraturan perundang-undangan di tingkat pusat dan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Npmpr 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 berpengaruh terhadap perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan kalurahan, dan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 turut mempengaruhi beberapa sektor perencanaan yang telah disusun.

Kemudian dampak bencana non alam berupa pandemik Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) telah membawa risiko bagi kesehatan masyarakat dan membawa implikasi bagi perekonomian masyarakat Kalurahan Terong. Selain menimbulkan korban jiwa dan juga mempengaruhi aktivitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan serta membawa implikasi besar bagi perekonomian masyarakat Kalurahan Terong. Pemerintah Pusat kemudian berinisiatif menerbitkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang. Hal ini kemudian mempengaruhi refocussing anggaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan sebelumnya. Dan kebijakan tentang perubahan ke dua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terutama ketentuan Pasal 79 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Berkaitan dengan hal tersebut, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Desa Terong Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN KALURAHAN TERONG NOMOR 2



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH KALURAHAN
TAHUN 2018-2026**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh.

Dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kami persembahkan Dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJM Kal) ini sebagai dokumen strategis yang akan menjadi panduan bagi Pemerintah Kalurahan dalam melaksanakan pembangunan yang terarah, bertahap, dan berkelanjutan selama dua tahun ke depan.

Perubahan RPJM Kalurahan ini merupakan wujud dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kalurahan. Dalam pasal 79 ayat (2) disebutkan bahwa RPJM Kalurahan harus mencakup jangka waktu selama 8 (delapan) tahun. Sementara itu, RPJM Kalurahan yang telah disusun sebelumnya memiliki jangka waktu 6 (enam) tahun. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian dengan menambah periode dokumen RPJM Kalurahan untuk tahun ke-7 dan tahun ke-8, sesuai dengan perpanjangan masa jabatan Lurah.

Proses penyusunan RPJM Kalurahan ini tidak hanya mempertimbangkan kebutuhan dan potensi lokal, tetapi juga diselaraskan dengan kebijakan pembangunan di tingkat nasional, propinsi dan kabupaten. Kami berusaha agar setiap program dan kegiatan yang direncanakan dapat menjawab tantangan yang dihadapi Kalurahan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kami memahami bahwa keberhasilan pelaksanaan RPJM Kalurahan sangat bergantung pada kerja sama dan sinergi berbagai pihak. Oleh karena itu, kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus berperan aktif dan memberikan dukungan penuh dalam mewujudkan pembangunan Kalurahan yang lebih baik dan berkelanjutan.

Akhirnya, kami berharap Perubahan RPJM Kalurahan ini dapat menjadi pedoman yang efektif bagi semua pihak terkait dalam pelaksanaan pembangunan Kalurahan selama masa tambahan jabatan Lurah, serta menjadi langkah awal menuju kemajuan dan kesejahteraan yang merata bagi seluruh warga kalurahan. Kami berharap dokumen ini dapat bermanfaat dan memenuhi harapan kita semua.

Wassalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh.

Terong, Juni 2025

Lurah Terong,

SUGIYONO, S.E

DAFTAR ISI

| | |
|--|----|
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1. Latar Belakang | 1 |
| 1.2. Maksud dan Tujuan | 3 |
| 1.3. Landasan Hukum | 4 |
| BAB II GAMBARAN UMUM DESA TERONG | 6 |
| 2.1. Sejarah Kalurahan | 6 |
| 2.2. Kondisi Geografi Dan Demografi | 7 |
| 2.2.1. Wilayah | 7 |
| 2.2.2. Potensi Wisata | 10 |
| 2.2.3. Peternakan | 11 |
| 2.2.4. Perikanan air tawar | 11 |
| 2.3. Kondisi Sosial | 12 |
| 2.3.1. Kependudukan | 12 |
| 2.3.2. Pendidikan | 12 |
| 2.3.3. Kesejahteraan | 13 |
| 2.3.4. Kesehatan | 15 |
| 2.3.5. Kebudayaan | 17 |
| 2.3.6. Organisasi Pemerintahan dan Lembaga Kemasyarakatan | 22 |
| BAB III VISI DAN MISI | 23 |
| 2.1. Visi Desa Terong | 23 |
| 2.2. Misi Desa Terong | 23 |
| BAB IV STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN | 25 |
| 3.1. Kebijakan Pembangunan | 25 |
| 3.2. Arah Kebijakan Pembangunan Kalurahan | 29 |
| 3.3. Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan | 29 |
| 3.4. Pelaksanaan pembangunan Kalurahan | 29 |
| 3.5. Pembinaan kemasyarakatan | 29 |
| 3.6. Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan | 29 |
| 3.7. Strategi Pencapaian | 30 |
| 3.8. Strategi eksternal | 30 |
| BAB V ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN KALURAHAN | 32 |
| 5.1. Kebijakan Keuangan Kalurahan | 32 |
| 5.2. Kebijakan Belanja Kalurahan | 32 |
| 5.3. Kebijakan Pembiayaan Kalurahan | 33 |
| BAB VI PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATIF | 34 |
| 6.1. Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan | 34 |
| 6.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan | 35 |
| 6.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | 36 |
| 6.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat | 37 |
| 6.5. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Kalurahan | 38 |
| 6.6. PEMBIAYAAN | 38 |
| BAB VII PENUTUP | 39 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | |



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kalurahan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat kalurahan menjadi upaya utama untuk meningkatkan kualitas hidup demi kesejahteraan masyarakat kalurahan. Upaya ini dilakukan secara berkelanjutan dengan berlandaskan pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Seiring dengan perkembangan demokrasi dan keterbukaan di era otonomi kalurahan saat ini, masyarakat kalurahan memiliki akses politik yang semakin kuat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kalurahan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa dilakukan berdasarkan asas-asas seperti:

1. **Rekognisi** yaitu pengakuan terhadap hak asal usul;
2. **Subsidiaritas**, yaitu penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat kalurahan;
3. **Keberagaman**, yaitu pengakuan dan penghormatan terhadap sistem nilai yang berlaku di masyarakat kalurahan, tetapi dengan tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
4. **Kebersamaan**, yaitu semangat untuk berperan aktif dan bekerja sama dengan prinsip saling menghargai antara kelembagaan di tingkat kalurahan dan unsur masyarakat kalurahan dalam membangun kalurahan;
5. **Kegotongroyongan**, yaitu kebiasaan saling tolong-menolong untuk membangun kalurahan;
6. **Kekeluargaan**, yaitu kebiasaan warga masyarakat Desa sebagai bagian dari satu kesatuan keluarga besar masyarakat kalurahan;
7. **Musyawarah**, yaitu proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat Desa melalui diskusi dengan berbagai pihak yang berkepentingan;
8. **Demokrasi**, yaitu sistem pengorganisasian masyarakat kalurahan dalam suatu sistem pemerintahan yang dilakukan oleh masyarakat kalurahan atau dengan persetujuan masyarakat Desa serta keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa diakui, ditata, dan dijamin;
9. **Kemandirian**, yaitu suatu proses yang dilakukan oleh Pemerintah kalurahan dan masyarakat kalurahan untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri;
10. **Partisipasi**, yaitu turut berperan aktif dalam suatu kegiatan;



6. Selektif yaitu semua masalah terseleksi dengan baik untuk mencapai hasil yang optimal.
7. Efisiensi dan efektif yaitu pelaksanaan perencanaan kegiatan sesuai dengan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang tersedia.
8. Keberlanjutan yaitu setiap proses dan tahapan kegiatan perencanaan harus berjalan secara berkelanjutan.
9. Cermat yaitu data yang diperoleh cukup obyektif, teliti, dapat dipercaya dan menampung aspirasi masyarakat.
10. Proses berulang yaitu pengkajian terhadap suatu masalah/hal dilakukan secara berulang sehingga mendapatkan hasil yang terbaik.
11. Penggalan informasi yaitu di dalam menemukan masalah dilakukan penggalan informasi melalui alat kajian keadaan kalurahan dengan sumber informasi utama dari peserta musyawarah perencanaan

Perubahan RPJM Desa merupakan perencanaan pembangunan yang dibutuhkan kalurahan sebagai instrumen atau acuan kegiatan selama tambahan masa jabatan Lurah yang disusun oleh semua elemen masyarakat yang ada di kalurahan atau yang mewakilinya serta semua pihak yang berkepentingan merupakan dokumen perencanaan pembangunan enam tahun yang esensinya memuat program-program prioritas pembangunan sebagai komitmen dalam pemerintahan, pembangunan sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan adalah sebagai arah kebijakan dan program 2018-2024 dan kemudian dijabarkan ke dalam perencanaan tahunan atau RKP Desa.

Selain sebagai petunjuk dan penentu arah kebijakan, dokumen ini juga digunakan untuk dasar penilaian kinerja Lurah dalam melaksanakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat selama masa jabatannya sebelumnya yakni 6 (enam) tahun. Dokumen ini juga dapat digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan Lurah Terong dalam laporan pertanggungjawaban Lurah yang diserahkan kepada Bamuskal Terong maupun masyarakat umum sesuai dengan peraturan penrundang-undangan yang berlaku.

1.2. Maksud dan Tujuan

Perubahan RPJM Desa Terong Tahun 2018- 2024 sebagai bahan dasar dan pedoman resmi bagi Pemerintah Kalurahan, Bamuskal, LPMK, PKK, semua elemen masyarakat dan semua pihak yang berkepentingan dalam pembangunan kalurahan selama tambahan masa jabatan Lurah sesuai dengan amanat Revisi UU Desa. Selain itu, dokumen ini menjadi acuan penentuan pilihan-pilihan program kegiatan tahunan yang akan dibahas dalam rangkaian forum musyawarah perencanaan pembangunan secara berjenjang. Untuk itu isi dan substansinya mencakup indikasi rencana program kegiatan secara lintas sumber pembiayaan, baik dari ADD, BHP, DD, BKK, Unit Anggaran dari jenjang di atasnya maupun dari semua pihak yang berkepentingan dengan pembangunan Kalurahan Terong.

Perubahan RPJM Desa tahun 2018 – 2024 pada tambahan masa jabatan Lurah selama 2 (dua) tahun disusun dengan maksud yaitu :

1. menyediakan dasar dan pedoman resmi bagi seluruh jajaran aparatur pemerintah kalurahan, Bamuskal, Lembaga-lembaga Kemasyarakatan, seluruh elemen masyarakat serta semua pihak yang berkepentingan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai dari APBKal dan anggaran dari jenjang unit pemerintahan di atasnya.
2. menyediakan tolak ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap unsur/bidang didalam pemerintahan kalurahan, serta



- sebagai bahan bagi perencanaan dan penganggaran pembangunan kalurahan tahunan.
3. menjabarkan gambaran tentang kondisi kalurahan sekarang dalam konstelasi kecamatan dan kabupaten. Sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai pada kurun waktu enam tahun dalam rangka mewujudkan visi dan misi kalurahan.
 4. memudahkan seluruh jajaran pemerintahan kalurahan, Bamuskal dan lembaga-lembaga kemasyarakatan, elemen lain dan semua pihak yang berkepentingan dalam mencapai tujuan dengan menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
 5. memudahkan jajaran aparatur pemerintah kalurahan, Bamuskal, Lembaga-lembaga Kemasyarakatan, seluruh elemen masyarakat serta semua pihak yang berkepentingan untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan pembangunan tahunan dalam kurun waktu enam tahun.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Perubahan RPJM Desa tahun 2018 - 2024 disusun untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dengan tujuan sebagai berikut :

- a. mewujudkan perencanaan pembangunan kalurahan sesuai dengan kebutuhan dan keadaan masyarakat.
- b. menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab masyarakat terhadap program pembangunan di kalurahan.
- c. memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di kalurahan.
- d. menumbuh kembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan kalurahan.

1.3. Dasar Hukum

Dalam penyusunan Perubahan RPJM Desa Tahun 2018- 2024 didasarkan pada beberapa landasan, antara lain :

- 1) Landasan Ideologis Pancasila.
- 2) Landasan Konstitusional Undang-Undang Dasar 1945.
- 3) Landasan Pokok :
 - a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;



- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- n. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
- o. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa;
- p. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat;
- q. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Peningkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama;
- r. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
- s. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
- t. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa;
- u. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024;
- v. Peraturan Desa Terong Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018-2024;



Camat Dlingo, agar Poniran (Carik), diangkat sebagai Penjabat Lurah Desa Terong mulai bulan Mei 2012.

Tanggal 10 Oktober 2012 Panitia Pemilihan Lurah akhirnya membuka kembali Penjaringan Bakal Calon Lurah Desa Terong, yang pada akhirnya mendapatkan 3 nama Bakal Calon yakni, Welasiman, Sukamdani dan Sugiyono S.E. Pada proses pemungutan suara tanggal 4 November 2012, akhirnya Panitia Pemilihan Lurah, mendapatkan calon Lurah terpilih yaitu Welasiman.

Lurah desa Terong yang semenjak bulan Mei 2012 dijabatkan kepada Poniran, akhirnya berakhir pada tanggal 20 November 2012 yang ditandai dengan dilantikannya Lurah Desa Terong hasil Pemilihan, yaitu Welasiman dengan masa bhakti 2012 sampai dengan 2018.

Daftar Lurah Terong dari Tahun 1912:

1. Trosentono (Bekel) (1912 – 1930)
2. Demang Harjo Utomo (1930 – 1950)
3. Joyo Wiyarjo (1950 – 1966)
4. Harjo Suwarno (1966 – 1992)
5. Sudirman (1994 – 2002)
6. Sudirman, S.E. (2002 – 2012) atau Ngabehi Sudirman Wiro Mandoyo
7. Welasiman (2012-2018)
8. Sugiyono,SE (2018-2024) (Mas Lurah Joyo Diyono);
9. Sugiyono,SE (2024-2026) (Mas Lurah Joyo Diyono);

2.2. Kondisi Geografi Dan Demografi

2.2.1 Wilayah

Kalurahan Terong merupakan salah satu dari 6 kalurahan di Kapanewon Dlingo, terletak diwilayah Timur Kabupaten Bantul yang merupakan daerah perbukitan dengan kemiringan 30° dengan ketinggian dari permukaan laut 350 mdl, dan berbatasan langsung dengan wilayah Kabupaten Gining Kidul. Luas wilayah Kalurahan Terong adalah 775.8615 Ha, yang terbagi dalam 9 pedukuhan dan 42 RT, sebagaimana dapat dilihat dalam tabel 1.

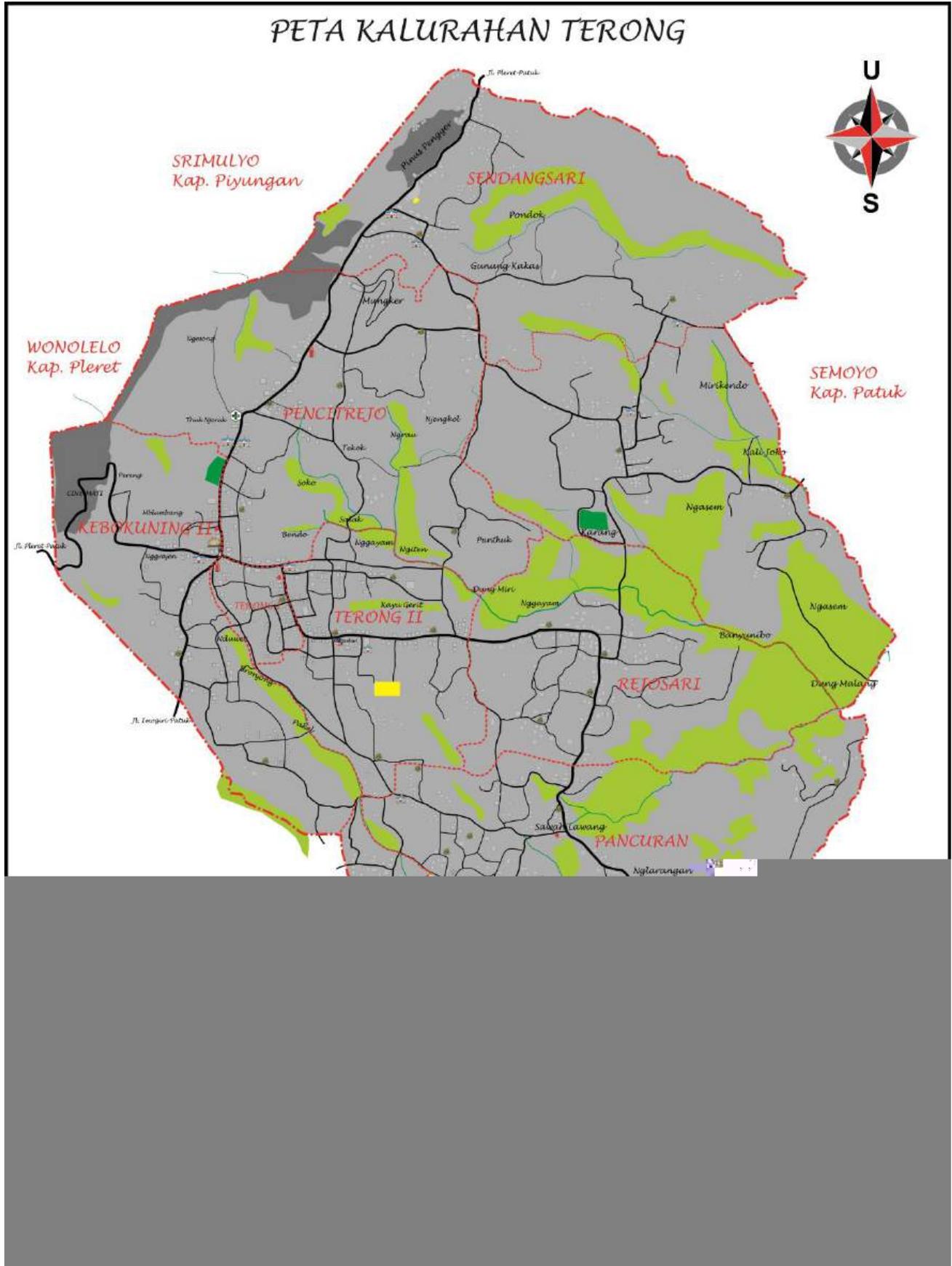
| NO | PEDUKUHAN | LUAS WILAYAH (ha) |
|---------------|-------------|-------------------|
| 01 | KEBOKUNING | 64,00 |
| 02 | SARADAN | 98,02 |
| 03 | PANCURAN | 120,00 |
| 04 | REJOSARI | 88,00 |
| 05 | TERONG II | 87,00 |
| 06 | TERONG I | 7,80 |
| 07 | PENCITREJO | 89,03 |
| 08 | SENDANGSARI | 89,00 |
| 09 | NGENEP | 133,01 |
| JUMLAH | | 775.86 |

Tabel 2.1 Luas Wilayah
Sumber Prodeskel 2024



Batas-batas wilayah Kalurahan Terong adalah :

- o Sebelah Utara : Kalurahan Srimulyo, Kapanewon Piyungan
- o Sebelah Timur : Kalurahan Jatimulyo, Kapanewon Dlingo
- o Sebelah Selatan : Kalurahan Muntuk, Kapanewon Dlingo
- o Sebelah Barat : Kalurahan Wonolelo, Kapanewon Pleret





Pada umumnya lahan yang terdapat di wilayah Kalurahan Terong belum digunakan secara produktif, dengan kondisi wilayah yang perbukitan sehingga untuk pemanfaatan lahan untuk pertanian masih banyak lahan yang belum dimaksimalkan pengolahannya, berakibat masih terdapat banyak lahan kritis.

Dengan iklim tropis pada umumnya, Kalurahan Terong memiliki curah hujan 198,00 mm, dengan Suhu rata-rata harian 31,00°C, dengan musim penghujan rata-rata 7 bulan.

Dengan kondisi tanah sebagian besar berwarna merah dan bertekstur lempung menjadikan potensi untuk ditanami komoditas pertanian seperti padi, jagung, ubi, ketela, alpukat, durian, dan lain-lain.

Luas tanaman pangan menurut komoditas:

| | | |
|----------------|-----------|--------------|
| Jagung | 162,70 Ha | 1,27 Ton/ha |
| Ubi jalar | 5,00 Ha | 3,00 Ton/ha |
| Cabe | 1,00 Ha | 1,00 Ton/ha |
| Tomat | 1,00 Ha | 1,00 Ton/ha |
| Mentimun | 1,00 Ha | 1,00 Ton/ha |
| Kacang kedelai | 70,00 Ha | 0,00 Ton/ha |
| Terong | 1,00 Ha | 0,80 Ton/ha |
| Bayam | 1,00 Ha | 0,50 Ton/ha |
| Tumpang Sari | 17,00 Ha | 34,00 Ton/ha |
| Kacang tanah | 69,00 Ha | 21,90 Ton/ha |
| Kacang panjang | 6,00 Ha | 0,00 Ton/ha |
| Padi sawah | 147,00 Ha | 54,30 Ton/ha |
| Padi ladang | 18,60 Ha | 0,00 Ton/ha |
| Ubi kayu | 260,00 Ha | 0,00 Ton/ha |

Tabel 2.2 Komoditas Pertanian
Sumber Prodeskel 2024

Kepemilikan Lahan Tanaman Buah-buahan:

Data tahun 2024 menyebutkan bahwa keluarga yang memiliki lahan perkebunan sejumlah 1.602 keluarga dengan keluasan masing-masing kurang lebih 10 hektar.

| | | |
|-------------|-----------|-------------|
| Alpukat | 162,70 Ha | 2,90 Ha |
| Mangga | 5,30 Ha | 0,00 Ton/ha |
| Rambutan | 1,30 Ha | 0,00 Ton/ha |
| Salak | 0,50 Ha | 0,00 Ton/ha |
| Pepaya | 1,00 Ha | 0,00 Ton/ha |
| Durian | 2,50 Ha | 0,00 Ton/ha |
| Sawo | 0,50 Ha | 0,00 Ton/ha |
| Pisang | 7,90 Ha | 0,00 Ton/ha |
| Lengkeng | 0,50 Ha | 0,00 Ton/ha |
| Melinjo | 15,00 Ha | 0,00 Ton/ha |
| Kacang mede | 1,00 Ha | 0,20 Ton/ha |
| Cengkeh | 2,00 Ha | 0,60 Ton/ha |
| Kelapa | 15,00 Ha | 0,00 Ton/ha |

Tabel 2.3 Komoditas Perkebunan
Sumber Prodeskel 2024



Luas Lahan Kehutanan Menurut Pemilikan:

| | | |
|-----------------------------|-----------|---------------|
| Milik Negara | 37,00 ha | Hitan lindung |
| Milik masyarakat perorangan | 170,00 ha | |
| Total | 207,00 ha | |

Tabel 2.4 Lahan hutan
Sumber Prodeskel 2024

| | |
|--------|---------------------------|
| Kayu | 6,65 M ³ /th |
| Bambu | 44.500,00 btg/th |
| Jati | 335,00 M ³ /th |
| Mahoni | 225,00 M ³ /th |
| Arang | 99,00 M ³ /th |

Tabel 2.5 Hasil hutan
Sumber Prodeskel 2024

2.2.2. Potensi Wisata

Desa/ Kalurahan memiliki potensi sebagai destinasi wisata yang berbasis komunitas dan berlandaskan pada kearifan lokal kultural masyarakatnya dan juga dapat sebagai pemicu peningkatan ekonomi yang berprinsip gotong royong dan berkelanjutan. Desa wisata Indonesia secara garis besar terbagi menjadi 3 produk unggulan yaitu berbasis budaya, alam, dan kreatif. Roh desa wisata Indonesia sebagai implementasi keterhubungan multi dimensi yang holistik harus dapat mengedepankan konsep see, feel and explore sebagai dasar desa wisata. Demikian halnya dengan Kalurahan Terong yang memiliki banyak sekali potensi wisata didukung wilayahnya yang terletak pada pegunungan/dataran tinggi. Juga kalurahan Terong menjadi jalur alternatif menuju beberapa tempat wisata, melihat hal tersebut kalurahan Terong berpotensi untuk dikembangkan menjadi kalurahan wisata.

Potensi wisata di Kalurahan Terong:

| | | |
|---|----------------|---|
| 1 | Bukit Cinomati | Bertempat di Padukuhan Kebokuning, memiliki kelebihan pada pemandangan kota Yogyakarta yang cukup indah. Namun perancangan mengenai tempat wisata tersebut belum begitu maksimal. Hal tersebut diperlukan perancangan agar Bukit Cinomati dapat dikembangkan. |
| 2 | Pinus Pengger | Berlokasi di Padukuhan Sendangsari merupakan kawasan perhutani milik negara yang memiliki kelebihan pada pemandangan alam, menjadi destinasi keluarga yang sangat ramah dan nyaman. |



| | | |
|---|---------------------|--|
| | Persawahan | lahan terasering yang menjadi ciri khas kalurahan belum sepenuhnya optimal, dan kurangnya investasi dalam infrastruktur terasering. menjadi salah satu wadah perputaran perekonomian kalurahan berdasarkan perancangan area wisata keluarga, kuliner, dan budaya setempat yang terpusat, serta tertata dan menjadi perencanaan jangka panjang. |
| 5 | Sendang Sura Setika | Meupakan situs peninggalan nenek moyang yang menjadi pusat upacara adat budaya di Padukuhan Saradan dan Pancuran, sehingga merupakan distinasi wisata qolbu dan wisata budaya. |
| 6 | Gunung Mungker | Seperti halnya dengan bukit Cino Mati dan Watu Loncat merupakan destinasi dengan pemandangan alam. Berlokasi diperbatasan Padukuhan Pencitrejo dan Sendangsari |
| 7 | Banyunibo | Merupakan wisata alam persawahan yang berlokasi di Padukuhan Rejosari, dan masih perlu sentuhan agar menjadi destinasi wisata yang menarik. |

2.2.3. Peternakan

Penduduk Kalurahan Terong hampir 80% memelihara ternak ayam kampung, Disamping itu dengan maraknya kegiatan peternakan ternak ayam potong dengan sistem kemitraan untuk memenuhi kebutuhan pasar ada sekitar 4 peternak yang mengelola ternak ayam potong dengan rata-rata memelihara sebanyak 2.000 – 4.000 ekor.

| | | |
|--------------------|------------|-------------|
| Sapi | 300 orang | 420 ekor |
| Ayam kampung | 1270 orang | 7.543 ekor |
| Jenis ayam broiler | 8 orang | 20.000 ekor |
| Bebek | 2 orang | 280 ekor |
| Kambing | 30 orang | 230 ekor |
| Burung puyuh | 5 orang | 3.500 ekor |
| Kelinci | 12 orang | 67 ekor |
| Unggas lainnya | 8 orang | 134 ekor |

Tabel 2.6 Populasi hewan ternak
Sumber Prodeskel 2024

2.2.4. Perikanan air tawar

| Jenis ikan | Jumlah peternak | Jumlah |
|-------------|-----------------|------------|
| Ikan Lele | 12 orang | 1.500 ekor |
| Ikan Gurame | 3 orang | 150 ekor |
| Ikan Nila | 15 orang | 350 ekor |

Tabel 2.7 Populasi ikan



2.3 Kondisi Sosial

2.3.1 Kependudukan

Jumlah penduduk Kalurahan Terong berdasarkan pencatatan terakhir Desember 2024 adalah 5.753 jiwa, jumlah penduduk laki-laki 2.894 jiwa dan , jumlah penduduk perempuan 2.859 jiwa, dengan jumlah Kepala Keluarga 2.049 KK.

| JENIS KELAMIN | JUMLAH |
|------------------------|------------|
| Jumlah Laki-laki | 2.894 jiwa |
| Jumlah perempuan | 2.859 jiwa |
| Jumlah kepala keluarga | 2.049 KK |

Tabel 2.7 Jumlah Penduduk berdasarkan jenis kelamin
Sumber SID

Perkembangan Penduduk :

| Jenis Kelamin | Jumlah Tahun Ini | Jumlah Tahun Lalu | Perkembangan |
|------------------------|------------------|-------------------|--------------|
| Jumlah Laki-laki | 2.894 jiwa | 2.827 jiwa | 2,32% |
| Jumlah perempuan | 2.859 jiwa | 2.904 jiwa | -1,57% |
| Jumlah kepala keluarga | 2.049 KK | 2.013 jiwa | 1,76% |
| Kepadatan Penduduk | 742,32 per km | | |

Tabel 2.8 Perkembangan Penduduk
Sumber SID

| | |
|---------------------|------------|
| 0-12 BULAN | 43 jiwa |
| 1 - < 5 Tahun | 218 jiwa |
| ≥ 5 – 7 Tahun | 165 jiwa |
| ≥7 -< 15 Tahun | 629 jiwa |
| >15 -56 Tahun | 3.249 jiwa |
| Lebih dari 56 Tahun | 1.449 jiwa |
| Jumlah | 5.753 jiwa |

Tabel 2.9 Jumlah Penduduk menurut usia
Sumber SID

2.3.2 Pendidikan

Pendidikan merupakan upaya dasar untuk menyiapkan peserta didik melalui bimbingan, pengajaran, dan atau peranannya di masa yang akan datang. Pendidikan adalah satu hal penting dalam memajukan tingkat kesejahteraan pada umumnya, dan tingkat perekonomian pada khususnya. Dengan tingkat pendidikan akan mendorong tumbuhnya keterampilan kewirausahaan. Dan pada gilirannya mendorong munculnya lapangan pekerjaan baru. Dengan sendirinya



akan membantu program pemerintah untuk pembukaan lapangan kerja baru guna mengatasi pengangguran.

| Kategori Kelompok | Laki-Laki | Perempuan |
|------------------------------|-----------|-----------|
| Tidak / Belum Sekolah | 553 | 558 |
| Belum Tamat SD/Sederajat | 228 | 198 |
| Tamat SD / Sederajat | 702 | 793 |
| SLTP/Sederajat | 579 | 609 |
| SLTA / Sederajat | 735 | 597 |
| Diploma I / II | 6 | 12 |
| Akademi/ Diploma III/S. Muda | 23 | 25 |
| Diploma IV/ Strata I | 62 | 63 |
| Strata II | 5 | 4 |
| Strata III | 1 | 0 |
| JUMLAH | 2.894 | 2.859 |

Tabel 2.10 Jumlah Penduduk menurut Pendidikan Sumber SID

| No | Kelompok Balita | Alamat | Jumlah Pendidik | Jml. Anak Didik |
|--------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|
| 1. | MELATI | Kebokuning | 6 | 20 |
| 2. | SAKURA | Saradan | 3 | 15 |
| 3. | DAHLIA | Pancuran | 5 | 20 |
| 4. | ANGGREK CERIA | Pancuran | 2 | 0 |
| 5. | MAWAR | Rejosari | 5 | 17 |
| 6. | TERATAI | Terong II | 4 | 20 |
| 7. | MATAHARI | Pencitrejo | 5 | 20 |
| 8. | FLAMBOYAN | Sendangsari | 6 | 15 |
| 9. | KENANGA | Sendangsari | 3 | 11 |
| 10. | BOUGENVILLE | Ngenep | 4 | 15 |
| JUMLAH | | | 43 | 153 |

Tabel 2.11 Data PAUD

| No | Sarana Pendidikan | Jumlah |
|----|-------------------|--------|
| 1. | PAUD/KB | 10 |
| 2. | TK | 4 |
| 3. | TPA/TPQ | 19 |
| 4. | SD | 4 |
| 5. | SMP | 1 |

Tabel 2.12 Data sarana pendidikan

2.3.3 Kesejahteraan

Tantangan yang dihadapi dalam pembangunan kesejahteraan sosial meliputi proses globalisasi dan industrialisasi serta krisis ekonomi dan politik yang berkepanjangan. Dampak yang dirasakan diantaranya semakin berkembang dan meluasnya bobot, jumlah dan kompleksitas berbagai permasalahan sosial.



Keadaan ini bisa dilihat dan diamati dari data tabel penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).

| No | Kriteria | Jumlah |
|-------|---------------------|--------|
| 1. | Lansia Terlantar | 26 |
| 2. | Anak Terlantar | 8 |
| 3. | Difabel/disabilitas | 82 |
| Total | | 116 |

Tabel 2.12 Data PMKS

| No. | Pedukuhan | BPNT | PKH | BLT D |
|-----|-------------|------|-----|-------|
| 1 | Kebokuning | 53 | 31 | 2 |
| 2 | Saradan | 44 | 34 | 4 |
| 3 | Pancuran | 71 | 52 | 5 |
| 4 | Rejosari | 25 | 26 | 3 |
| 5 | Terong II | 73 | 60 | 3 |
| 6 | Terong I | 25 | 20 | 1 |
| 7 | Pencitrejo | 68 | 57 | 3 |
| 8 | Sendangsari | 33 | 27 | 3 |
| 9 | Ngenep | 53 | 32 | 3 |
| | JUMLAH | 445 | 339 | 27 |

Tabel 2.13 Data Penerima Bantuan

| No | Mata Pencaharian | Jumlah |
|-----|-----------------------|--------|
| 1. | Petani | 863 |
| 2. | Buruh Harian | 633 |
| 3. | Pegawai Negeri | 44 |
| 4. | TNI/POLRI | 6 |
| 5. | Guru | 23 |
| 6. | Peternak | 3 |
| 7. | Karyawan | 338 |
| 8. | Buruh Tani | 669 |
| 9. | Pensiunan | 25 |
| 10. | Pedagang/wiraswasta | 772 |
| 11. | Tukang /Mekanik | 31 |
| 12. | Tukang Jahit | 5 |
| 13. | Belum/tidak bekerja | 915 |
| 14. | Pelajar/Mahasiswa | 957 |
| 15. | Mengurus Rumah Tangga | 373 |
| 16. | Dokter | 2 |
| 17. | Tenaga Kesehatan | 7 |
| 18. | Perias | 1 |
| 19. | Transportasi/Sopir | 10 |
| 20. | Lain-lain | 94 |

Tabel 2.14 Matapencaharian penduduk



2.3.4 Kesehatan

Program kesehatan kalurahan memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Sebagai tulang punggung sistem kesehatan di tingkat kalurahan, program ini bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang merata, mudah diakses, dan berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat. Menuju kalurahan Sehat adalah tujuan utama dari adanya program kesehatan kalurahan yang berkelanjutan dan berbasis masyarakat. Program kesehatan kalurahan seperti posyandu memberikan akses yang lebih mudah dan terjangkau terhadap layanan kesehatan dasar, seperti pemeriksaan kesehatan rutin, imunisasi, konsultasi gizi, dan penyuluhan kesehatan. Selain itu, program ini juga mengintegrasikan pendekatan preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif dalam upayanya menciptakan masyarakat yang sehat secara holistik. Melalui edukasi dan sosialisasi, masyarakat diajak untuk aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan, praktik hidup sehat, serta deteksi dini terhadap penyakit. Dengan demikian, kalurahan sehat bukan hanya sekedar label, tetapi sebuah konsep yang melibatkan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat dalam menjaga dan meningkatkan kualitas hidup secara menyeluruh.

| URAIAN | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Penolong Balita Tenaga Kesehatan | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Angka Kematian Bayi (IMR) | - | - | - | 1 | 0 |
| Angka Kematian Ibu Melahirkan (MMR) | - | - | 1 | 0 | 0 |
| Cakupan Imunisasi | 98 % | 95 % | 97 % | 100 % | 99 % |
| Balita Gizi Buruk | 1 | 1 | - | 0 | 0 |

Tabel 2.14 angka kesehatan

| No | Indikator | Jumlah |
|-----|---------------------|--------|
| 1. | Ibu Hamil | 26 |
| 2. | Ibu Hamil Risti | 5 |
| 3. | Kematian Ibu | 0 |
| 4. | Jumlah bayi | 77 |
| 5. | Kematian bayi | 4 |
| 6. | Jumlah Balita | 299 |
| 7. | Kasus Gizi Kurang | 32 |
| 8. | Penderita DBD | 12 |
| 9. | Jumlah Kematian DBD | 0 |
| 10. | Kasus TBC Paru | 5 |

Tabel 2.14 Data bayi dan ibu hamil



| No | Kelompok Balita | Alamat | Jumlah Kader | Jml. Balita |
|--------|-----------------|-------------|--------------|-------------|
| 1. | MELATI | Kebokuning | 6 | 30 |
| 2. | SAKURA | Saradan | 7 | 40 |
| 3. | DAHLIA | Pancuran | 11 | 36 |
| 4. | ANGGREK | Pancuran | 8 | 18 |
| 45. | MAWAR | Rejosari | 8 | 34 |
| 6. | TERATAI | Terong II | 9 | 32 |
| 7. | MENUR | Terong I | 5 | 17 |
| 8. | MATAHARI | Pencitrejo | 10 | 40 |
| 9. | FLAMBOYAN | Sendangsari | 6 | 36 |
| 10. | KENANGA | Sendangsari | 5 | 10 |
| 11. | BOUGENVILLE | Ngenep | 9 | 31 |
| JUMLAH | | | 84 | 324 |

Tabel 2.15 Data kelompok balita

| No | Sarana Kesehatan | Jumlah |
|----|-----------------------|--------|
| 1. | Puskesmas | 1 |
| 2. | Poskesdes | 1 |
| 3. | Bidan Desa | 2 |
| 4. | Posyandu | 11 |
| 5. | Posbindu | 9 |
| 6. | Apotek | 2 |
| 7. | Dokter/mantri praktek | 2 |
| 8. | Rumah bersalin | 2 |

Tabel 2.16 Data sarpras kesehatan

| No | Kelompok Lansia | Alamat | Jumlah Kader | Jumlah Lansia |
|--------|-----------------|-------------|--------------|---------------|
| 1. | MELATI | Kebokuning | 6 | 40 |
| 2. | SAKURA | Saradan | 6 | 38 |
| 3. | DAHLIA | Pancuran | 9 | 40 |
| 4. | ANGGREK | Pancuran | 7 | 33 |
| 5. | MAWAR | Rejosari | 4 | 40 |
| 6. | TERATAI | Terong II | 4 | 45 |
| 7. | MENUR | Terong I | 5 | 55 |
| 8. | MATAHARI | Pencitrejo | 6 | 40 |
| 9. | FLAMBOYAN | Sendangsari | 4 | 40 |
| 10. | KENANGA | Sendangsari | 3 | 27 |
| 11. | BOUGENVILLE | Ngenep | 5 | 55 |
| JUMLAH | | | 59 | 453 |

Tabel 2.15 Data kelompok lansia



2.3.5 Kebudayaan

Tuhan Yang Maha Esa telah menganugerahkan bangsa Indonesia kekayaan atas keberagaman suku bangsa, adat istiadat, bahasa, pengetahuan dan teknologi lokal, tradisi, kearifan lokal, dan seni. Keberagaman tersebut merupakan warisan budaya bangsa bernilai luhur yang membentuk identitas bangsa di tengah dinamika perkembangan dunia. Pun demikian dengan kebudayaan yang ada di Kalurahan Terong. Kebudayaan dapat menjadi sarana untuk mengembangkan literasi dan pendidikan, baik yang formal maupun informal. Melalui kegiatan-kegiatan budaya, masyarakat dapat belajar tentang sejarah, nilai-nilai, dan keterampilan tradisional yang bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Kebudayaan desa dapat menjadi wadah bagi masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan, baik dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan proyek, maupun pengawasan hasil pembangunan. Hal ini mendorong partisipasi masyarakat dan memperkuat rasa memiliki terhadap pembangunan desa.

Saat ini dimana kecepatan modernisasi di Indonesia berbanding lurus dengan kecepatan mudarnya tradisi. Kemajuan teknologi modern tidak terbatas pada penggunaan alat dan metode baru, tetapi juga perubahan pola pikir dan kebiasaan, sehingga perlu adanya upaya untuk tetap menjaga dan melestarikannya, karena keberadaan kebudayaan di kalurahan dapat menjadi inspirasi dalam merancang pembangunan yang berkelanjutan, yang memperhatikan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan secara seimbang. Pembangunan desa yang berbasis kebudayaan dapat menciptakan desa yang maju, berdaya saing, dan ramah lingkungan. Kebudayaan yang ada di Kalurahan Terong merupakan modal dasar pembangunan yang melandasi pembangunan yang akan dilaksanakan, warisan budaya yang bernilai luhur merupakan modal dasar dalam rangka pengembangan budaya yang dijiwai oleh mayoritas keluhuran nilai agama.

Kebudayaan kalurahan dapat menjadi modal penting dalam mengembangkan potensi ekonomi lokal, seperti kerajinan tangan, produk pertanian, dan pariwisata berbasis budaya. Ini dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, mengurangi pengangguran, dan mendorong pertumbuhan ekonomi desa.

Potensi Kebudayaan yang masih dilestarikan antara lain:

| | | |
|-----|---|--|
| 1. | Merti Dusun/ Rasulan/ Dekahan | Sebagai perwujudan Rasa syukur Kepada Tuhan YME |
| 2. | Sedekah Bumi | Dimudahkan dalam bertani |
| 3. | Peringatan Hadeging Kalurahan | Memperingati hari jadi Kalurahan Terong |
| 4. | Kirab Budaya | Memperingati hari jadi Kalurahan Terong |
| 5. | Tayuban / Ledekan | Guyub rukun terhindar dari malapetaka, mendapat keselamatan, kesejahteraan dan ketenteraman. |
| 6. | Gumbregan | Rasa syukur atas hewan ternak |
| 7. | Jamasan Pusaka | Merawat pusaka |
| 8. | Wewehan | Berbagi rejeki |
| 9. | Nguras Sendang | Melestarikan air yang tiap hari digunakan |
| 10. | Minum Air sendang Surosetiko bagi pengantin yang salah satu dari pasangannya berasal dari | Melambangkan Permohonan kepada Tuhan YME agar diberi kelanggengan dalam menjalani rumah tangga |

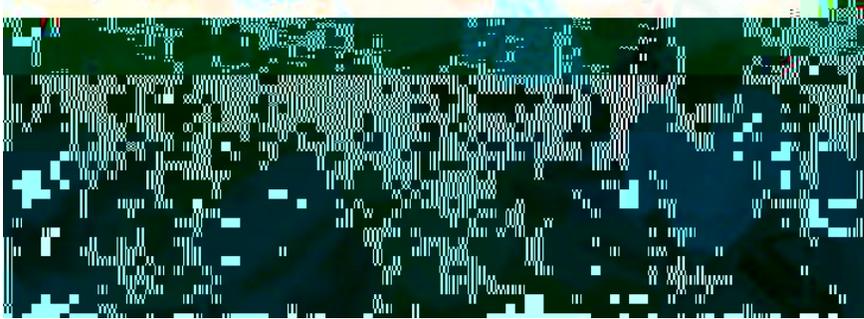


| | | |
|-----|--------------------------------------|--|
| | warga Pedukuhan Saradan/ Pancuran | |
| 11. | Mitoni | Mendoakan bayi yang di kandung agar terlahir dengan Normal, lancar, dan di jauhkan dari berbagai kekurangan dan berbagai bahaya. |
| 12. | Brokohan | Untuk keselamatan dan perlindungan bagi sang bayi, selain itu harapan bagi sang bayi agar kelak menjadi anak yang memiliki perilaku yang baik |
| 13. | Puputan | Mengungkapkan rasa Syukur dan kebahagiaan orang tua bayi, serta untuk meminta do'a dari keluarga dan saudara-saudara untuk keselamatan dan kebahagiaan anak. |
| 14. | Sepasaran | Memohon keselamatan bagi si bayi |
| 15. | Walik | Membenahi (mapake) wadah bayi/perut ibu yang habis melahirkan |
| 16. | Selapanan | Ritual yang di lakukan pada bayi yang sudah menginjak umur 35 hari, dari perhitungan berdasarkan kalender jawa |
| 17. | Tekenan | Anak agar dapat segera berjalan cepat |
| 18. | Supitan | Mencegah penyakit |
| 19. | Lamaran | Meminang calon pengantin perempuan kepada orang tuanya |
| 21. | Ruwatan | Upacara pensucian diri dari malapetaka |
| 22. | Mbandul anak lair sapar | Bembersihan diri dari malapetaka /sukerto |
| 23. | Mantu/ mantenan | Prosesi menyatukan laki-laki dengan Perempuan dalam ikatan pernikahan dengan syah yang di lakukan oleh bapak naib |
| 24. | Selapanan Manten | Mensyukuri bahwa manten sudah berumur 35 hari |
| 25. | Sur Tanah | Sebagai simbol permisi (kulonuwun) yang bermakna manusia berasal dari tanah dan akan kembali menjadi tanah |
| 26. | Mitung Dino | Selamatan setelah tujuh hari meninggalnya seseorang |
| 27. | Patang Puluh Dino | Selamatan pada saat empat puluh hari meninggalnya seseorang |
| 28. | Satusan | Selamatan pada saat seratus hari setelah meninggalnya seseorang |
| 29. | Pendak Pisan | Selamatan pada saat satu tahun setelah meninggalnya seseorang |
| 30. | Pendak Pindo (pengeling-eling) | Selamatan pada saat dua tahun setelah meninggalnya seseorang |
| 31. | Nyewu | Selamatan pada saat tiga tahun /seribu hari setelah meninggalnya seseorang |

Tabel 2.11 Adat/tradisi yang masih dilaksanakan



Tradisi kenduri



Upacara nguras sendang



Uba rampe dalam upacara/tradisi adat



Potensi kelompok kesenian:

| No | Nama Kelompok / Sanggar | Jenis Seni | Alamat |
|-----|--------------------------------|-----------------|------------|
| 1. | Sekar Anom | Karawitan | Saradan |
| 2. | Dodog Tresno budoyo | Reog | Saradan |
| 3. | Sekar Kinanthi | Karawitan Putri | Saradan |
| 4. | Putri Aji | Sholawatan | Pencitrejo |
| 5. | Condro kirono | Ketoprak | Saradan |
| 6. | Turangga Muda | Jathilan | Pencitrejo |
| 7. | Sholawat Baitul Mutaqin | Sholawatan | Pencitrejo |
| 8. | Langen Budaya | Reog | Pancuran |
| 9. | Putri Menir | Gejog Lesung | Terong I |
| 10. | Dwi Manunggal | Jathilan | Pancuran |
| 11. | Sekar Rinonce | Campursari | Saradan |
| 12. | Sendang Surosetiko | Upacara Adat | Pancuran |
| 13. | Muda Budaya | Tari | Saradan |
| 14. | Cipto Giri Budaya | Karawitan | Kebokuning |
| 15. | Wayang Kulit | Wayang kulit | Saradan |
| 16. | Liwaul Mustafa | Musik Religi | Saradan |
| 17. | Arga Nada | Musik Religi | Saradan |
| 18. | Paguyuban Gambyong Tayub | Tayub | Saradan |
| 19. | Turangga Mudho Ngesti Kawedhar | Jatilan | Saradan |
| 21. | Ardi Puspito Budaya | Macapat | Terong I |
| 22. | Langen Sekar Giri Cendana | Macapat | Pencitrejo |
| 23. | Kredha Budaya | Macapat | Terong II |
| 24. | Sekar Ringin Sari | Macapat | Kebokuning |
| 25. | Nata swara | Macapat | Saradan |
| 26. | Aniwaryalaksana | Tari | Terong II |
| 27. | Budi suci 7 bintang | Pencak silat | Pancuran |

Tabel 2.12 Adat/tradisi yang masih dilaksanakan

Keberadaan situs budaya di kalurahan:

| No | Nama Situs | Alamat |
|----|-----------------------|-------------|
| 1. | Makam Kyai Damar Jati | Sendangsari |
| 2. | Sendang Sura Setika | Saradan |
| 3. | Sendang Mintotaruno | Saradan |
| 4. | Sendang Sendangsari | Sendangsari |



Situs Kyai Damarjati
Makam Sendangsari



Situs Budaya
Sendang Sura Setika , Padukuhan Saradan



Situs Budaya
Sendang Mintotaruno, Padukuhan Saradan



Situs Budaya
Sendang Sendangsari, Padukuhan Sendangsari



2.3.6 Organisasi Pemerintahan dan Lembaga Kemasyarakatan

Sesuai Peraturan Bupati Bantul nomor 134 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul nomor 128, struktur organisasi dan tatakerja pemerintah Kalurahan Terong sebagai berikut:

| | | |
|---------------------------|---|---|
| Lurah | : | SUGIYONO, S.E (Lurah Jayadiyana) |
| Carik | : | VINA ARYANI, S.Pd |
| Jagabaya | : | KEMIJO |
| Ulu Ulu | : | RAHMAJI, S.Pd.S.D |
| Kamituwa | : | WAJAR ALIY KAKKIM, S.Kom |
| Kepala Urusan Pangripta | : | AGUS KAHARUDDIN |
| Kepala Urusan Danarta | : | SITA USWATUN KASANAH, S.E |
| Kepala Urusan Tatalaksana | : | IKA NOLIA MULYANTI, S.S |
| Staf Kalurahan | : | 1. SUWOTO 2. SUMIRAN 3. EVI RAHMAWATI 4. AZIS AGUS SAPUTRA |
| Staf Honorer | : | 1. EVI YULIANA, Amd 2. DIAN CITRA FITRIANI, S.E 3. ANANTEA RESIWI, S.S 4. AGUNG SETYA PRABAWA, S,T 5. WINTO HIDAYAT |

Pelaksana Kewilayahan

| | | |
|-------------------|---|---------------------|
| Dukuh Kebokuning | : | APRIYANTO NUGROHO |
| Dukuh Saradan | : | FENDI PRADANA PUTRA |
| Dukuh Pancuran | : | SUGIYADI |
| Dukuh Rejosari | : | KASIYANTO, S.T |
| Dukuh Terong II | : | YULIYANTO |
| Dukuh Terong I | : | GATOT PURWANTA |
| Dukuh Pencitrejo | : | SUDARI |
| Dukuh Sendangsari | : | SUYADI, S.Sos |
| Dukuh Ngenep | : | SUYOYO |

Badan Permusyawaratan Kalurahan

| | | |
|---------------------------|---|-----------------------------------|
| Ketua | : | JANGKUNG SUKRISNO |
| Wakil Ketua | : | SUKRIYANTO |
| Sekretaris | : | SURYANI, S.Pd |
| Ketua Bidang Pemerintahan | : | TRİYATNO |
| Ketua Bidang Pembangunan | : | MARYANTO |
| Anggota | : | 1. DANANG MARWANTO 2. SURATMAN |

Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan:

| LKK | Ketua | Anggota |
|------------|-----------------------------|----------------|
| LPMK | NURYANTO, S.Pd | 28 orang |
| PKK | SURATMIYANI | 28 orang |
| POKJA I | ENIK MASIMAH | 5 orang |
| POKJA II | ALMARATUS SALBIYAH, S.Pd.SD | 5 orang |
| POKJA III | SULIS RETNANINGSIH | 6 orang |
| POKJA IV | ENI MARYUNI, S.Keb. | 6 orang |
| RT | KULMAN | 42 orang |
| LINMAS | ISMAN PRAYOTO | 46 orang |



BAB III VISI MISI

3.1. Visi

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, ke mana dan bagaimana Desa Terong harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen stakeholder's.

Cita-cita masa depan sebagai tujuan jangka menengah yang ingin diraih oleh Lurah Desa yang dirumuskan selama 6 tahun kedepan. Cita-cita itulah yang kemudian mengerucut sebagai Visi Lurah Desa. Adapun Visi Lurah Desa Terong adalah sebagai berikut :

01a 01b . .

Melalui visi ini diharapkan masyarakat menemukan gambaran kondisi masa depan yang lebih baik (ideal) dan merupakan potret keadaan yang ingin dicapai, dibanding dengan kondisi yang ada saat ini. Melalui rumusan visi ini diharapkan mampu memberikan arah perubahan masyarakat pada keadaan yang lebih baik, menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk mengendalikan dan mengontrol perubahan-perubahan yang akan terjadi, mendorong masyarakat untuk meningkatkan kinerja yang lebih baik, menumbuhkan kompetisi sehat pada anggota masyarakat, menciptakan daya dorong untuk perubahan serta mempersatukan anggota masyarakat.

3.2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya.

Hakekat misi merupakan turunan dari visi yang akan menunjang keberhasilan tercapainya sebuah visi. Dengan kata lain Misi merupakan penjabaran lebih operatif dari Visi. Penjabaran dari visi ini diharapkan dapat mengikuti dan mengantisipasi setiap terjadinya perubahan situasi dan kondisi lingkungan di masa yang akan datang dari usaha-usaha mencapai Visi desa selama masa enam tahun.

Untuk meraih Visi Lurah Desa Terong seperti yang sudah dijabarkan di atas, dengan mempertimbangan potensi dan hambatan baik internal maupun eksternal, maka disusunlah Misi Desa Terong sebagai berikut:

1. Pembangunan SDM Pamong Kalurahan Menuju Pelayanan Prima;
2. Pembangunan Sarana Prasarana Berskala Kalurahan;
 - a. Perkerasan jalan lingkungan (Rabat Beton) di seluruh wilayah Kalurahan Terong;
 - b. Mengupayakan kemudahan masyarakat dalam memperoleh air bersih;



- c. Penataan kembali perempatan Ringin Terong sampai dengan Balai Kalurahan Terong;
 - d. Penerangan jalan lingkungan di seluruh wilayah Kalurahan Terong;
 - e. Renovasi sarana olah raga di Kalurahan Terong;
 - f. Peningkatan sanitasi lingkungan dengan program jambanisasi bagi keluarga miskin;
 - g. Pembangunan Embung berdasarkan masterplan kalurahan;
3. Pembangunan Ekonomi Masyarakat Kalurahan
- a. Pendirian Badan Usaha Milik Kalurahan (BUM Kal);
 - b. Pengelolaan Pasar Desa Dangwesi;
 - c. Pembangunan rest area dan kios kalurahan;
 - d. Destinasi wisata berbasis masyarakat di Gunung Mungker, Cino Mati, dan Watu Loncat;
 - e. Peningkatan produktivitas pertanian melalui agro industri;
 - f. Pembangunan kawasan Argopolitan berbasis kalurahan;
 - g. Pembangunan Market Place menuju E-Desa.
4. Pembangunan Dan Pelestarian Budaya
- a. Pembangunan Sendang Suro Setiko dusun Saradan;
 - b. Pelestarian budaya lokal sebagai kekayaan yang adi luhung.



BAB IV STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

3.1 Kebijakan Pembangunan

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 TAHUN 2014 tentang Desa sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 , tujuan pembangunan desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, membangun potensi ekonomi lokal , serta pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, pada periode tahun 2018-2026, rencana pembangunan jangka menengah desa diarahkan untuk peningkatan aparatur pemerintah desa dan BPD, penguatan peran dan fungsi kelembagaan kemasyarakatan serta penguatan masyarakat desa.

Disamping itu, arah kebijakan Perencanaan Pembangunan kalurahan yang difokuskan pada upaya pencapaian 18 SDGs Desa, diantaranya adalah:

I. KALURAHAN TANPA KEMISKINAN DAN KELAPARAN

tercapainya kesejahteraan ekonomi masyarakat dan memastikan akses terhadap pangan yang cukup untuk mencapai kedaulatan pangan, perbaikan asupan nutrisi dan promosi pertanian yang berkelanjutan, tujuan dari SDGs Desa:

1: Desa Tanpa Kemiskinan:

- × Tingkat kemiskinan desa dan kemiskinan ekstrem desa mencapai 0%;
- × Persentase masyarakat peserta Jaminan Kesehatan dan Ketenagakerjaan mencapai 100%;
- × Keluarga miskin penerima bantuan sosial mencapai 100%;
- × Keluarga miskin mendapat layanan kesehatan, pendidikan, air bersih, dan hunian layak mencapai 100%;
- × Individu miskin korban bencana yang ditangani mencapai 100%;

2: Desa Tanpa Kelaparan :

- × Prevalensi kurang gizi, kurus, stunting, anemia turun menjadi 0%;
- × Persentase bayi yang mendapatkan ASI Eksklusif mencapai 100%;
- × Keberadaan pertanian pangan tiap KK;

II. KALURAHAN PEDULI KESEHATAN

meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat melalui berbagai program kesehatan dan akses terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas, tujuan dari SDGs Desa:

3: Desa Sehat dan Sejahtera :

- × BPJS Kesehatan mencapai 100% penduduk;
- × persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan dan menggunakan tenaga kesehatan terampil mencapai 100%;
- × angka kematian ibu dan bayi 0;
- × imunisasi dasar lengkap pada bayi mencapai 100%;
- × prevalensi HIV, TBC, tekanan darah tinggi, obesitas, narkoba mencapai 0%;
- × partisipasi masyarakat pada posyandu dan posbindu meningkat;
- × korban penyalahgunaan NAPZA (narkoba) 100%;
- × angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun mencapai 0%;



- 6: Desa Layak Air Bersih dan Sanitasi :
memenuhi kebutuhan air bersih dan sanitasi yang layak bagi masyarakat, tujuan dari SDGs Desa:
× akses terhadap layanan air minum dan sanitasi layak mencapai 100% keluarga;
× keluarga dan industri yang dilayani air baku mencapai 100%;
× jumlah mata air tetap (tidak berkurang);
× terdapat kegiatan penanaman pohon disekitar aliran;
× tidak ada lahan tandus dan erosi;
- 11: Kawasan Permukiman Desa Aman dan Nyaman :
× rumah kumuh mencapai 0%;
× pengamanan dilaksanakan di 100% RT;
× kebudayaan, adat istiadat yang dilestarikan mencapai 100%;
× tersedia peringatan dini bencana;
× indeks resiko bencana (IRB) seluruh RT mencapai 0%;
× optimalisasi tenaga keamanan kalurahan dan wilayah;
× terdapat pengolahan sampah dan penanganan sampah keluarga mencapai 100%;
× terdapat taman/lapangan olah raga yang layak di kalurahan;

III. KALURAHAN PEDULI PENDIDIKAN

memberikan akses pendidikan yang berkualitas bagi semua masyarakat tujuan dari SDGs Desa:

- 4: Pendidikan Desa Berkualitas :
× akses anak ke SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA berakreditasi minimal B mencapai 100%;
× angka partisipasi PAUD/TK, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA mencapai 100%;
× angka melek aksara latin dan jawa pada penduduk mencapai 100%;
× rata-rata lama sekolah penduduk >20 tahun mencapai 12 tahun;
× tersedia taman bacaan masyarakat atau perpustakaan;

IV. KALURAHAN EKONOMI TUMBUH MERATA

menciptakan lapangan kerja yang layak dan membuka peluang ekonomi baru untuk masyarakat, sehingga menyerap angkatan kerja kalurahan, tujuan dari SDGs Desa:

- 8: Pertumbuhan Ekonomi Desa Merata :
× terdapat akses permodalan formal dan UMKM;
× tingkat pengangguran menurun;
× angkatan kerja baru yang terlatih;
× wisatawan meningkat dan sektor wisata memberikan kontribusi untuk masyarakat;
- 9: Infrastruktur dan Inovasi Desa Sesuai Kebutuhan :
× volume jalan dalam kondisi baik meningkat;
× pertumbuhan industri rumah tangga, kecil dan menengah;
× memberikan kontribusi industri perumahan;
× inovasi kalurahan tercatat dan disebarluaskan;
- 10: Desa Tanpa Kesenjangan :
× ketimpangan ekonomi menurun;
× tingkat kemiskinan menurun;
× status perkembangan (IDM) desa naik;
× jumlah pekerja peserta BPJS Ketenagakerjaan mencapai 100%;
- 12: Konsumsi dan Produksi Desa Sadar Lingkungan :



- × tiap padukuhan tersedia unit pengolah sampah;

V. KALURAHAN RAMAH PEREMPUAN

menciptakan kondisi yang inklusif bagi perempuan dan menempatkan dalam posisi yang adil tanpa diskriminasi dalam segala aspek, tujuan dari SDGs Desa:

5: Keterlibatan Perempuan Desa :

- × kebijakan kalurahan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan;
- × menjamin perempuan untuk mendapatkan pelayanan, informasi, dan pendidikan terkait keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
- × prevalensi kasus kekerasan terhadap anak perempuan mencapai 0%;
- × kasus kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif mencapai 100%;
- × usia kawin pertama perempuan di atas 18 tahun;
- × tidak ada angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun;
- × persentase jumlah perempuan di Lembaga Kalurahan minimal 30%;
- × persentase jumlah perempuan yang menghadiri musyawarah kalurahan dan berpartisipasi dalam pembangunan kalurahan minimal 30%;

VI. KALURAHAN TANGGAP BUDAYA

optimalisasi kelembagaan kalurahan agar dapat menopang pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, melestarikan dan mengembangkan budaya lokal sebagai bagian integral dari pembangunan kalurahan, tujuan dari SDGs Desa:

16: Desa Damai Berkeadilan:

- × kriminalitas, perkelahian, KDRT, kekerasan terhadap anak mencapai 0%;
- × terselenggara gotong royong antar penduduk;
- × pekerja anak mencapai 0%;
- × perdagangan manusia mencapai 0%;
- × tersedia layanan hukum untuk orang miskin;
- × proses pengadaan barang dan jasa terbuka untuk publik;
- × laporan pertanggungjawaban lurah dan laporan keuangan diterima dalam musyawarah kalurahan;
- × SOTK pemerintahan kalurahan sesuai peraturan yang berlaku;
- × tingkat kepuasan pelayanan pemerintah kalurahan tinggi;
- × Cakupan kepemilikan data identitas diri (KTP, KK, akta kelahiran, dll) 100%;
- × Dokumen perencanaan dan keuangan dapat diakses publik, disediakan dalam waktu sehari, dan seluruh pengaduan informasi ditangani;

18: Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif:

- × Kegiatan tolong menolong;
- × tokoh agama berpartisipasi dalam musyawarah kalurahan dan implementasi pembangunan kalurahan;
- × terdapat kegiatan santunan/pemeliharaan anak yatim dan orang miskin;
- × pelaksanaan musyawarah kalurahan minimal 4 kali setahun;
- × Tersedia dokumen RPJM, RKP, APB Kal;



- × tersedia peta batas desa yang telah ditetapkan oleh bupati;
- × Bumkal terakreditasi/berbadan hukum;
- × kebudayaan yang dilestarikan mencapai 100%;
- × penyelesaian masalah sosial melalui pendekatan budaya;
- × aset kalurahan meningkat;
- × lembaga kemasyarakatan kalurahan yang ikut musyawarah kalurahan >30%;

VII. KALURAHAN BERJEJARING

merevitalisasi kemitraan kalurahan untuk mewujudkan seluruh tujuan pembangunan kalurahan berkelanjutan dengan melibatkan pihak-pihak terkait seperti tokoh masyarakat, pemuda penggerak kalurahan, perempuan penggerak ekonomi, lembaga kemasyarakatan kalurahan hingga aparatur kalurahan, tujuan dari SDGs Desa:

17: Kemitraan untuk Pembangunan Desa :

- × Terdapat kerja sama kalurahan dengan kalurahan lain, pihak ketiga, dan lembaga pemerintah;
- × Tersedia jaringan internet tetap (wifi) dan mobile (handphone) berkecepatan tinggi;
- × Komoditas kalurahan yang diekspor meningkat;
- × Informasi kondisi sosial dan ekonomi dapat diakses publik;
- × Tersedia data statistik setiap tahun, aplikasi statistik dan petugas bidang statistik di kalurahan;
- × Tersedia data SDGs setiap tahun;

VIII. KALURAHAN PEDULI LINGKUNGAN

melindungi dan menjaga lingkungan alam kalurahan melalui berbagai program pengelolaan lingkungan, seperti penanaman pohon, pengelolaan sampah, dan konservasi air, mengurangi dampak lingkungan yang ditimbulkan terhadap bumi melalui pola produksi dan konsumsi sewajarnya, pertumbuhan ekonomi yang mempertimbangkan keberlanjutan, tujuan dari SDGs Desa:

7: Desa Berenergi Bersih dan Terbarukan :

- × Keluarga pengguna listrik mencapai 100%, dengan konsumsi >900 kWh/kapita;
- × Keluarga pengguna gas atau sampah kayu untuk memasak mencapai 100%;
- × Pengguna bauran/campuran energi terbarukan mencapai 60% keluarga;

13: Desa Tanggap Perubahan Iklim :

- × risiko bencana di seluruh rumah tangga menurun;
- × penanganan/mitigasi resiko bencana mencakup 100% terhadap peluang kebencanaan tiap rumah tangga;

15: Desa Peduli Lingkungan Darat :

- × pemanfaatan bahan organik untuk pertanian;
- × luas kawasan lahan terbuka minimal 33% dari luas desa;
- × luas lahan hutan rusak dan lahan kritis di hutan mencapai 0%, pemanfaatan kayu dari hutan yang direstorasi;



3.2 Arah Kebijakan Pembangunan Kalurahan

Pembangunan diarahkan pada pengembangan pusat-pusat pertumbuhan untuk mendorong pengembangan perdesaan berkelanjutan yang memiliki ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi serta mendorong keterkaitan desa-kota. Kebijakan pembangunan ini dilakukan dengan strategi sebagai berikut:

3.3 Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan:

- a. Memfasilitasi peningkatan rutinitas pemerintah kalurahan;
- b. Memfasilitasi peningkatan rutinitas Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal) dan lembaga lembaga lainnya di tingkat kalurahan;
- c. Mempersiapkan data, informasi, dan indeks desa yang digunakan sebagai acuan bersama dalam perencanaan dan pembangunan, serta monitoring dan evaluasi kemajuan perkembangan kalurahan;
- d. memastikan secara bertahap pemenuhan alokasi dana desa;
- e. memfasilitasi kerjasama antar kalurahan;

3.4 Pelaksanaan pembangunan Kalurahan:

- a. Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat perdesaan dalam hal : pembangunan infrastruktur penunjang peningkatan perekonomian masyarakat desa (Jalan lingkungan, jembatan, jalan pertanian, irigasi, Drainase, TPT);
- b. Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat perdesaan dalam bidang pendidikan dan kesehatan dasar (penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan serta tenaga pendidikan dan kesehatan);
- c. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana dasar dalam menunjang kehidupan sosial-ekonomi masyarakat perdesaan yang berupa akses ke pasar, lembaga keuangan, sekolah, dan pusat pemerintahan;
- d. Pembentukan dan Pengembangan BUM Kal serta penguatan permodalan BUM Kal;

3.5 Pembinaan kemasyarakatan:

- a. meningkatkan rutinitas masyarakat miskin dan rentan dalam pengembangan usaha berbasis potensi lokal;
- b. memberikan dukungan bagi masyarakat miskin dan rentan melalui penyediaan lapangan usaha, dana bergulir, kewirausahaan, dan lembaga keuangan mikro.

3.6 Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan:

- a. meningkatkan keberdayaan masyarakat melalui penguatan sosial budaya masyarakat dan keadilan gender (kelompok wanita, pemuda, anak, dan TKI);
- b. perwujudan kemandirian pangan dan pengelolaan SDA yang berkelanjutan dengan memanfaatkan inovasi dan teknologi tepat guna di perdesaan (dari sektor Pertanian);
- c. meningkatkan kegiatan ekonomi kalurahan yang berbasis komoditas unggulan, melalui pengembangan rantai nilai, peningkatan produktivitas, serta penerapan ekonomi hijau;



- d. menyediakan dan meningkatkan sarana dan prasarana dan produksi olahan;
- e. meningkatkan akses masyarakat desa terhadap modal usaha, pemasaran dan informasi pasar;
- f. mengembangkan lembaga pendukung ekonomi desa seperti koperasi, dan BUM Kal dan lembaga ekonomi mikro lainnya;

Realisasi kegiatan dimasing-masing bidang erat kaitannya dengan potensi pendapatan desa, untuk itu kegiatan dirinci secara lebih detail meliputi volume, manfaat/sasaran, waktu pelaksanaan dan perkiraan biaya/sumber pembiayaan. Dengan demikian RPJM Kal sangat bergantung pada sumber pembiayaan dari program-program yang masuk ke desa baik dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN melalui SKPD terkait. Disamping itu juga dipengaruhi oleh jumlah Dana Desa (DD), alokasi dana desa (ADD) serta tingkat Pendapatan Asli Desa (PADesa). Secara lebih terinci program pembanguna desa dijabarkan dalam lampiran yang menjadi bagian tak terpisahkan dari dokumen ini.

3.7 Strategi Pencapaian

Upaya untuk merealisasikan program pembangunan desa dilakukan tindakan strategis yang bersifat internal dan eksternal.

- A. Strategi internal pencapaian program pembangunan kalurahan meliputi:
 1. Peningkatkan sumber-sumber Pendapatan Asli Kalurahan (PAKal) melalui pendayagunaan potensi dan aset-aset desa yang selama ini belum dikelola secara maksimal serta penataan retribusi administrasi pelayanan publik yang jelas, tegas, transparan dan terjangkau.
 2. Mendorong peningkatan keswadayaan dan partisipasi masyarakat dalam setiap pembangunan.
 3. Penataan manajemen perencanaan pembangunan melalui pemilahan target pembangunan supra desa dan infra desa. Artinya target pembangunan yang menjadi wilayah SKPD kabupaten maupun provinsi seperti jalan kabupaten dan provinsi beserta bangunan pelengkapannya, maka leading sektornya diserahkan kepada kabupaten melalui musrenbang kecamatan, forum SKPD maupun musrenbang kabupaten dan seterusnya. Sedangkan sumber pembiayaan dimana kepala desa menjadi penanggungjawab dalam pelaksanaannya seperti DD dan ADD, maka dialokasikan untuk membiayai target pembangunan yang menjadi tanggung jawab desa seperti jalan lingkungan desa beserta bangunan pelengkapannya.
 4. Meningkatkan kesadaran kritis, rutinitas dan daya tawar politis masyarakat dalam pengelolaan pembangunan. Hal ini dilakukan agar RPJM Kal yang telah disusun melalui pendekatan partisipatif ini menjadi media pemberdayaan masyarakat dimana masyarakat desa semakin diperhitungkan dihadapan para stake holder.

3.8. Strategi eksternal pencapaian program pembangunan desa antara lain:

1. Melakukan pengawalan terhadap kebijakan pembangunan desa yang dituangkan dalam RPJM Kal pada forum musrenbang dan forum-forum SKPD.
2. Membangun kerjasama ditingkat antar desa untuk mendorong pemerintah daerah melakukan reorientasi kebijakan dalam memperkuat pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat.



3. Mendorong DPRD agar pro rakyat dan membentuk peraturan perundangan daerah yang mendukung pembangunan partisipatif. Hal ini untuk memberikan pedoman dan arah bagi SKPD untuk mensinergikan dan menyelaraskan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan perencanaan pembangunan melalui RPJM Kal.
4. Mendorong fungsi DPRD di dapil setempat sebagai wakil rakyat dalam mengakomodasi aspirasi RPJM Kal melalui haering dan jaring aspirasi masyarakat. Hal ini sekaligus menjadi pertanggungjawaban wakil rakyat kepada para konstituennya di daerah pemilihan. Sehingga bilamana anggota dewan yang bersangkutan tidak mampu memperjuangkan RPJM Kal, maka masyarakat akan memberikan sanksi politis pada pemilu berikutnya.
5. Membangun kemitraan dengan pihak ketiga dalam mewujudkan capaian program. Kemitraan tersebut meliputi kerjasama dengan dunia usaha dalam bidang pertanian, atau bentuk lain dari partisipasi dunia usaha dalam menjalankan tanggungjawab sosialnya.

Strategi internal dan eksternal tersebut diharapkan mampu mencapai indikator program selama 8 tahun ke depan dimana setiap tahun akan dievaluasi secara bertahap dengan mempertimbangkan masalah dan kondisi darurat pada setiap tahun anggaran.

Pelaksana dan koordinator masing-masing kegiatan sedapat-dapatnya disesuaikan dengan tupoksi masing-masing kelembagaan yang ada, namun tetap melibatkan masyarakat dan khususnya pemanfaat atau sasaran. Untuk kegiatan yang terkait sarana prasarana umum akan dikelola oleh LPMKal, kegiatan yang terkait bidang kesehatan dikoordinir oleh Poskesdes dan Posyandu, bidang pendidikan dikoordinir oleh Komite Sekolah, bidang pertanian dikoordinir oleh HIPPA dan kegiatan ekonomi dan usaha masyarakat dikelola oleh PKK, bidang kepemudaan akan dikoordinir oleh organisasi kepemudaan desa seperti Karang Taruna dan Remaja Masjid.

Seluruh kegiatan pembangunan beserta capaian tujuan akan senantiasa dievaluasi secara rutin serta melibatkan masyarakat (partisipatif). Pemantauan, evaluasi dan pertanggungjawaban dimaksud dilaksanakan dengan pendekatan sebagai berikut :

1. melakukan evaluasi proses pelaksanaan kegiatan baik fisik, biaya maupun administrasi;
2. melakukan capaian kegiatan secara fisik (volume dan kualitas);
3. melakukan capaian sasaran dan dampak;
4. melakukan pelestarian dan keberlanjutan kegiatan;

Sedangkan bentuk pemantauan dan evaluasi yang dapat diterapkan nantinya, adalah sebagai berikut :

1. Pemantauan bersama oleh masyarakat dan Bamuskal;
2. Musyawarah Pertanggungjawaban oleh masing - masing lembaga yang bertanggung jawab, yang pelaksanaannya mengikuti ketentuan masing-masing program/kegiatan tersebut;
3. Musyawarah evaluasi dan pertanggungjawaban terhadap capaian-capaian kegiatan RPJM Kalurahan, dilakukan rutin setiap tahun bersamaan dengan Muskal;
4. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Lurah dalam setiap akhir tahun anggaran.



BAB V ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN KALURAHAN

Dalam era otonomi setiap Desa/ Kalurahan dituntut untuk melakukan kegiatan pembangunan secara mandiri dalam untuk mengurangi ketergantungan dalam pembiayaan pembangunan kepada pemerintah Daerah dan Pusat. Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan, Desa/ Kalurahan membutuhkan sumber dana pembangunan, oleh karena itu setiap Desa/Kalurahan dituntut harus mampu berusaha mengoptimalkan sumber-sumber pendapatannya masing-masing.

5.1 Kebijakan Pendapatan Kalurahan

Kebijakan keuangan kalurahan merupakan potensi kalurahan dan sebagai penerimaan Kalurahan Terong sesuai urusannya diarahkan melalui upaya peningkatan pendapatan kalurahan dari sektor Pendapatan Asli Kalurahan, Dana Desa dan dana perimbangan. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah kalurahan untuk meningkatkan pendapatan kalurahan adalah :

1. memantapkan kelembagaan dan optimalisasi pungutan kalurahan;
2. meningkatkan pendapatan kalurahan dengan intensifikasi dan ekstensifikasi;
3. meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang pendapatan kalurahan;
4. meningkatkan kinerja BUM Kalurahan dalam upaya meningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap pendapatan kalurahan;
5. meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pungutan kalurahan;
6. meningkatkan pengelolaan asset dan keuangan kalurahan.

Analisa Pendapatan Kalurahan:

| no | Tahun | Sumber Pendapatan | | | | | | |
|----|-------|-------------------|---------------|-------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------|
| | | Pendapatan Asli | Dana Desa | Alokasi Dana Desa | Bagi Hasil Pajak Retribusi | Bantuan Keuangan Propinsi | Bantuan Keuangan Kabupaten | Pendapatan Lain-lain |
| 1 | 2018 | 78.876.276 | 932.509.000 | 1.053.229.000 | 145.002.600 | | 423.321.250 | |
| 2 | 2019 | 95.795.620 | 1.136.538.000 | 1.080.711.000 | 194.711.400 | | 1.155.000.000 | |
| 3 | 2020 | 84.019.890 | 1.187.530.000 | 1.100.711.000 | 200.885.218 | | 745.000.000 | 8.311.867 |
| 4 | 2021 | 129.690.500 | 1.268.103.000 | 1.068.778.238 | 227.673.235 | | 255.802.000 | 7.648.760 |
| 5 | 2022 | 246.594.203 | 1.067.693.000 | 1.031.650.000 | 228.833.800 | 238.000.000 | 1.010.000.000 | 8.539.298 |
| 6 | 2023 | 88.621.000 | 1.389.049.000 | 1.071.273.200 | 239.372.300 | 425.000.000 | 900.000.000 | 52.858.888 |
| 7 | 2024 | 102.172.677 | 1.253.492.000 | 1.106.592.405 | 258.536.538 | 175.000.000 | 730.000.000 | 7.838.705 |
| 8 | 2025 | 137.250.000 | 1.192.261.000 | 1.106.592.000 | 258.536.538 | 325.000.000 | 665.000.000 | 10.000.000 |
| 9 | 2026 | 137.250.000 | 1.192.261.000 | 1.106.592.000 | 258.536.538 | 750.000.000 | 1.100.000.000 | 10.000.000 |

Tabel. 5.1. analisa Pendapatan Kalurahan

5.2 Kebijakan Belanja Kalurahan

Arah kebijakan belanja kalurahan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam belanja program/kegiatan. Kebijakan belanja



kalurahan diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, antara lain melalui:

1. esensi utama penggunaan dana APB kalurahan adalah untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat oleh karena itu akan terus dilakukan peningkatan program-program yang berorientasi pada masyarakat dan berupaya melaksanakan realisasi belanja kalurahan tepat waktu dengan mendorong proses penetapan Perkal APB kalurahan secara tepat waktu pula;
2. meningkatkan kualitas anggaran belanja kalurahan melalui pola penganggaran yang berbasis kinerja dengan pendekatan tematik pembangunan yang disertai system pelaporan yang makin akuntabel;
3. penggunaan anggaran berbasis pada prioritas pembangunan yaitu dalam penentuan anggaran belanja dengan memperhatikan belanja tidak langsung dan belanja langsung sesuai dengan visi dan misi kalurahan;
4. Alokasi Anggaran Desa Indikatif;
5. berdasarkan kemampuan keuangan desa, Visi, Misi , Arah Kebijakan Pembangunan kalurahan serta prioritas kegiatan maka kebijakana olokasi indikatif belanja desa;

Analisa Belanja Kalurahan:

| no | Tahun | PROGRAM KEGIATAN | | | | | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat mendesak Kalurahan | Pembiayaan Kalurahan |
|----|-------|---------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------|---|----------------------|
| | | Bidang Pemerintahan | Bidang Pembangunan | Bidang Pembinaan Masyarakat | Bidang Pemberdayaan Masy. | | | |
| 1 | 2018 | 1.108.320.354 | 1.321.358.500 | 193.013.200 | 172.627.250 | | 437.864.700 | |
| 2 | 2019 | 979.674.969 | 2.199.506.200 | 264.930.500 | 319.929.800 | | 430.483.522 | |
| 3 | 2020 | 1.422.409.386 | 1.363.159.500 | 73.718.000 | 1.580.000 | 513.218.760 | 276.443.073 | |
| 4 | 2021 | 1.511.629.929 | 914.623.435 | 264.472.350 | 96.447.500 | 16.200.000 | 228.815.402 | |
| 5 | 2022 | 1.647.298.931 | 1.655.133.950 | 151.859.100 | 176.895.500 | 428.400.000 | 383.137.921 | |
| 6 | 2023 | 1.639.276.300 | 1.554.080.505 | 241.455.000 | 463.729.000 | 240.229.000 | 144.860.741 | |
| 7 | 2024 | 1.728.100.227 | 1.467.014.600 | 290.537.700 | 60.217.000 | 97.200.000 | 172.265.324 | |
| 8 | 2025 | 1.781.120.214 | 1.540.673.950 | 314.343.000 | 73.700.000 | 147.630.496 | 162.828.122 | |
| 9 | 2026 | 2.059.909.538 | 1.597.030.000 | 468.500.000 | 413.000.000 | 16.200.000 | | |

Tabel. 5.2. analisa belanja kalurahan

5.3. Kebijakan Pembiayaan Kalurahan

Arah Kebijakan Pembiayaan Kalurahan dimungkinkan adanya defisit maupun surplus. Defisit terjadi ketika pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan belanja, sedangkan surplus terjadi ketika pendapatan lebih besar dibandingkan belanja. Untuk menutup defisit diperlukan pembiayaan Kalurahan. Pembiayaan defisit anggaran antara lain bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, dana cadangan dan penjualan aset.



BAB VI PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATIF

Rumusan prioritas pembangunan kalurahan yang hendak dicapai meliputi 5 bidang mendasar, yaitu :

6.1 Penyelenggaraan Pemerntiahan Kalurahan

1. Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Kalurahan, antara lain:
 - a. penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan lurah;
 - b. penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan pamong kalurahan;
 - c. penyediaan jaminan sosial bagi lurah dan perangkat kalurahan;
 - d. penyediaan operasional pemerintah kalurahan;
 - e. penyediaan tunjangan Bamuskal;
 - f. penyediaan operasional Bamuskal;
 - g. penyediaan insentif/operasional RT;
 - h. penyediaan operasional pemerintah kalurahan dari Dana Desa;
 - i. penyediaan tunjangan kinerja bagi lurah, pamong kalurahan dan Bamuskal;
 - j. penyediaan tunjangan hari raya bagi lurah ,pamong kalurahan dan Bamuskal;
 - k. penyediaan tunjangan purna tugas bagi lurah, pamong kalurahan dan Bamuskal;
 - l. tunjangan masa kerja;
 - m. penghasilan tetap dan tunjangan staf kalurahan;
 - n. penyediaan penghasilan bagi staf honorer;
2. Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Kalurahan, antara lain:
 - a. penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan;
 - b. pemeliharaan gedung/prasarana kantor kalurahan;
 - c. rehabilitasi/peningkatan gedung/ prasarana kantor kalurahan **);
3. Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan, antara lain:Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan;
 - a. pemutakhiran profil kalurahan **);
 - b. pengelolaan adminstrasi dan kearsipan pemerintahan kalurahan;
 - c. pemetaan dan analisis kemiskinan kalurahan secara partisipatif;
 - d. pendataan potensi budaya kalurahan;
 - e. pengelolaan aplikasi E-Human Developmant Worker;
 - f. pemutakhiran data monografi kalurahan;
4. Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan, antara lain:
 - a. penyelenggaraan musyawarah perencanaan kalurahan;
 - b. penyelenggaraan musyawaran kalurahan lainnya;
 - c. penyusunan dokumen perencanaan kalurahan;
 - d. penyusunan dokumen keuangan kalurahan;
 - e. pengelolaan administrasi/ inventarisasi/penilaian aset kalurahan;
 - f. penyusunan kebijakan kalurahan;
 - g. penyusunan laporan lurah, LPPKal. dan Informasi Kepada Masyarakat;



- h. pengembangan Sistem Informasi Desa;
 - i. koordinasi/kerjasama penyelenggaraan pemerintahan & pembangunan kalurahan;
 - j. dukungan & sosialisasi pelaksanaan pilkades, pemilihan ka. kewilayahan & Bamuskal;
 - k. penyelenggaraan lomba antar kewilayahan & pengiriman kontingen dlm lomdes;
 - l. dukungan dan sosialisasi pengisian pamong dan staf honorer;
5. Sub Bidang Pertanahan, antara lain:
- a. sertifikasi tanah kas kalurahan;
 - b. administrasi pertanahan;
 - c. kegiatan mediasi konflik pertanahan;
 - d. adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
 - e. penentuan/penegasan batas/patok tanah kas kalurahan;

6.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan

1. Sub Bidang Pendidikan, antara lain:
 - a. penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah non formal milik kalurahan;
 - b. dukungan penyelenggaraan PAUD;
 - c. penyuluhan dan pelatihan pendidikan bagi masyarakat;
 - d. pemeliharaan sarana prasarana perpustakaan/ taman bacaan/ sanggar belajar milik kalurahan;
 - e. pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ pengadaan sarana/prasarana/alat peraga PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ milik kalurahan;
 - f. pengelolaan perpustakaan milik kalurahan;
 - g. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
 - h. dukungan pendidikan bagi siswa miskin/berprestasi;
 - i. pendampingan psikologis siswa dan orang tua;
2. Sub Bidang Kesehatan, antara lain:
 - a. penyelenggaraan pos kesehatan kalurahan/ polindes milik kalurahan;
 - b. penyelenggaraan posyandu;
 - c. penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan;
 - d. penyelenggaraan kalurahan siaga kesehatan;
 - e. pengasuhan bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB);
 - f. pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ pengadaan sarana/prasarana Posyandu/Polindes/PKD **;
 - g. fasilitasi penyelenggaraan Pos Binaan Terpadu (POSBINDU);
 - h. pengelolaan Rumah Kalurahan Sehat;
 - i. pembinaan kampung KB;
 - j. penanganan / pemulihan balita gizi buruk / stunting;
 - k. pendampingan ibu hamil kekurangan gizi kronis / resiko tinggi dan nifas;
 - l. gerakan kebersihan dan kesehatan lingkungan;
3. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, antara lain:
 - a. pemeliharaan jalan usaha tani;



- b. pemeliharaan pemakaman /situs bersejarah/ petilasan milik kalurahan;
- c. pemeliharaan monumen/gapura/batas kalurahan;
- d. pembangunan/ peningkatan/pengerasan jalan kalurahan **);
- e. pembangunan/ peningkatan/ pengerasan jalan lingkungan permukiman **);
- f. pembangunan/peningkatan/pengerasan jalan usaha tani **);
- g. pembangunan/rehabilitasi/ jembatan milik kalurahan **);
- h. pembangunan/rehabilitasi/ peningkatan prasarana jalan kalurahan (gorong, selokan dll);
- i. peningkatan pemakaman milik kalurahan/situs bersejarah milik kalurahan/petilasan;
- j. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan monumen/gapura/batas kalurahan **);

4. Sub Bidang Kawasan Pemukiman, antara lain:

- a. dukungan pelaksanaan program pembangunan/rehab rumah tidak layak huni GAKIN;
- b. pemeliharaan sumber air bersih milik kalurahan;
- c. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sumur resapan **);
- d. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sumber air bersih milik kalurahan **);
- e. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sanitasi permukiman **);
- f. pembanguan taman/rehabilitasi/pemeliharaan taman;

5. Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup, antara lain:

- a. pelatihan pengelolaan / pengelolaan sampah;
- b. penyediaan prasarana pengolahan sampah;

6. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, antara lain:

- a. penyelenggaraan informasi publik kalurahan;
- b. pembangunan/peningkatan/pengadaan sarana penerangan jalan;

7. Sub Bidang Pariwisata, antara lain:

- a. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana pariwisata milik **);
- b. pengembangan pariwisata tingkat kalurahan;

6.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan .

1. Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, antara lain: .

- a. pengadaan/penyelenggaraan pos keamanan kalurahan;
- b. penguatan & peningkatan kapasitas tenaga kW* n BT0 0 0 rg0 0 0 RG/F2



- h. penguatan kalurahan tangguh bencana;
 - i. pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap NAPZA tingkat kalurahan;
 2. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan, antara lain:
 - a. pembinaan group kesenian dan kebudayaan tingkat kalurahan;
 - b. pengiriman kontingen group kesenian & kebudayaan (wakil kalurahan tkt. kec/kab/kot);
 - c. penyelenggaraan festival kesenian, adat/kebudayaan, dan kegamaan (HUT RI, raya keagamaan dll);
 - d. pemeliharaan sarana prasarana kebudayaan, rumah adat dan kegamaan milik kalurahan;
 - e. pembangunan/rehabilitasi sarana prasarana kebudayaan/rumah adat/kegamaan milik kalurahan **);
 - f. pembinaan bidang keagamaan;
 - g. pembinaan/pengembangan adat, seni dan tradisi;
 - h. pengembangan kalurahan budaya;
 3. Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga, antara lain:
 - a. pengiriman kontingen kepemudaan & olahraga sebagai wakil kalurahan tkt kec/kab/kota;
 - b. penyelenggaraan festival/lomba kepemudaan dan olahraga tingkat kalurahan;
 - c. pemeliharaan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga milik kalurahan;
 - d. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan & olahraga milik kalurahan;
 - e. pembinaan karangtaruna/klub kepemudaan/olahraga tingkat kalurahan;
 4. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat, antara lain:
 - a. pembinaan LKMD/LPM/LPMD;
 - b. pembinaan PKK;
 - c. pelatihan pembinaan lembaga kemasyarakatan;
 - d. pembinaan/ peningkatan kapasitas lembaga kebudayaan kalurahan;
 - e. pembentukan LKK;
 - f. pelatihan peningkatan kapasitas lembaga kalurahan;
- 6.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat .
 1. Sub Bidang Kelautan dan Perikanan, antara lain:
 - a. pemeliharaan kolam perikanan darat milik kalurahan;
 - b. bimtek/pelatihan/pengenalan TTG untuk perikanan darat;
 - c. bimtek/pelatihan/pengembangan usaha pengolahan ikan;
 2. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan, antara lain:
 - a. penguatan ketahanan pangan tingkat kalurahan;
 - b. pemeliharaan saluran irigasi tersier/ sederhana;
 - c. pelatihan/bimtek/pengenalan tekonologi tepat guna untuk pertanian/peternakan;
 - d. pembangunan saluran irigasi tersier/ sederhana;
 - e. pelatihan pengolahan hasil pertanian/peternakan/ pasca panen;



3. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Kalurahan, antara lain:
 - a. peningkatan kapatitas perangkat kalurahan;
 - b. peningkatan kapasitas Bamuskal;
 - c. peningkatan kapasitas pengelolaan administrasi kalurahan;
 4. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga, antara lain:
 - a. pelatihan dan penyuluhan pemberdayaan perempuan;
 - b. pelatihan dan penyuluhan perlindungan anak;
 - c. pelatihan dan penguatan penyandang difable (penyandang disabilitas);
 - d. penyelenggaraan kalurahan inklusif;
 - e. pelatihan kerja (live skill) bagi ibu rumah tangga/remaja belum bekerja/keluarga;
 - f. pembinaan/sosialisasi pencegahan perkawinan usia dini;
 5. Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM) , antara lain:
 - a. pelatihan manajemen koperasi/KUD/UMKM;
 - b. pengembangan sarana prasarana usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi;
 - c. pengadaan teknologi tepat guna untuk pengembangan ekonomi pekalurahanan non pertanian;
 6. Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal, antara lain:
 - a. pembentukan BUM Kalurahan (persiapan dan pembentukan awal BUM Kalurahan);
 - b. pelatihan pengelolaan BUM Kalurahan (pelatihan yg dilaksanakan oleh pemerintah kalurahan);
 7. Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian, antara lain:
 - a. pemeliharaan pasar kalurahan/kios milik kalurahan;
 - b. pembangunan/rehab pasar kalurahan/kios milik kalurahan;
 - c. pembentukan/fasilitasi/pelatihan/pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif;
- 6.5. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Kalurahan
1. Sub Bidang Penanggulangan Bencana
 - a. Sarana Prasarana Tanggap Darurat
 2. Sub Bidang Keadaan Mendesak
 - b. Bantuan Langsung Tunai (BLT)
- 6.6 PEMBIAYAAN
1. Penyertaan Modal Kalurahan



BAB VII PENUTUP

Rencana pembangunan kalurahan tidak dapat lepas dari kebijakan pembangunan nasional yaitu pembangunan yang berkelanjutan, merupakan proses pembangunan yang berprinsip untuk memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan. Untuk mencapai keberlanjutan yang menyeluruh, diperlukan keterpaduan antara 3 pilar pembangunan, yaitu keberlanjutan dalam aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Tiga pilar utama tersebut yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan saling berintegrasi dan saling memperkuat satu dengan yang lain. Untuk itu tiga aspek tersebut harus diintegrasikan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan agar tercapai pembangunan berkelanjutan yang selain dapat menjaga lingkungan hidup/ekologi dari kehancuran atau penurunan kualitas, juga dapat menjaga keadilan sosial dengan tidak mengorbankan kebutuhan pembangunan ekonomi.

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat kalurahan pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsisten pemerintahan dan masyarakat desa saling bekerjasama membangun kalurahan. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, Pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan kalurahan. Keberhasilan pelaksanaan RPJM Kalurahan Terong tahun 2018–2026 ditentukan oleh komitmen dan dukungan seluruh Pamong Kalurahan, Bamuskal, Lembaga Masyarakat Kalurahan dan seluruh masyarakat serta seluruh pemangku kepentingan lainnya.

Penyusunan Perubahan RPJM Kal akan menghasilkan rencana pembangunan yang telah mempertimbangkan berbagai kemungkinan dari sisi kemampuan penganggarnya. Kemampuan anggaran kalurahan diperkirakan dalam bentuk pagu atau plafon indikatif anggaran kalurahan. Dengan penganggaran ini diharapkan akan lebih mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan desa dalam rangka mencapai visi, misi, dan program pembangunan kalurahan. Dalam rangka meningkatkan kemandirian desa, sudah saatnya digali semua potensi sumber daya dan modal dasar kalurahan yang dimiliki. Untuk itu perlu dilakukan identifikasi yang maksimal atas potensi sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya buatan dan sumber daya keuangan, untuk selanjutnya sumber daya tersebut dikembangkan menjadi pendukung utama dari berbagai kegiatan yang akan menghasilkan nilai tambah yang berdaya saing tinggi sehingga mampu mendukung kemandirian kalurahan.

Terong, 27 Mei 2025
Kurah Terong,

SUGIYONO, S.E



LAMPIRAN

1. Program/Kegiatan Perubahan RPJM Kalurahan 2018-2026
 2. Rencana program dan kegiatan pembangunan yang masuk ke kalurahan;
 3. Kalender Musim dan Daftar masalah dan Potensi dari Kalender Musim;
 4. Kelembagaan dan Daftar Masalah dan Potensi dari Bagan Kelembagaan;
 5. Sumber Daya Manusia Dan Daftar Masalah Dan Potensi Sumber Daya Manusia;
 6. Sumber Daya Pembangunan Dan Daftar Masalah Dan Potensi Sumber Daya Pembangunan;
 7. Sumber Daya Sosial Dan Budaya Dan Daftar Masalah Dan Potensi Sumber Daya Sosial Dan Budaya;
 8. Administrasi Penyusunan Perubahan RPJM Kal.:
 - a) Berita Acara Musrenbangkal Perubahan RPJM-Kal;
 - b) Berita Acara Kesepakatan Lurah dan Bamuskal tentang Perkal Perubahan RPJM Kal.;
 - c) Surat Keputusan Bamuskal tentang persetujuan Peraturan Kalurahan RPJM – Kal.;
 - d) Peraturan Kalurahan tentang Perubahan RPJM Kal.;
 - e) Dukumen Kegiatan Penyusunan Perubahan RPJM Kalurahan;
 - f) Daftar Hadir dan Berita Acara Musrenbangkal;
 - g) SK Tim Penyusun Perubahan RPJM-Kalurahan;
-

| No | Bidang / Sub Bidang/ Kegiatan | Mendukung SDGs Desa Ke | Data Existing | Target Capaian Tahun ke 1-8 | | | | | | | | Lokasi (RT/RW/ Dusun) | Perkiraan Volume & Satuan | Sasaran/ Manfaat | Waktu Pelaksanaan Tahun ke | | | | | | | Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan | | Perkiraan Pola Pelaksanaan | | | |
|---|--|------------------------|---------------|-----------------------------|---|---|---|---|---|---|---|-----------------------|---------------------------|------------------|----------------------------|------|------|------|------|------|------|---------------------------------------|------------|----------------------------|-------------|------------|-----------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | Jumlah (Rp) | Sumber | |
| | | | | e | f | g | h | i | j | k | l | | | | p | q | r | s | t | u | v | w | x | | | | y |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z | aa | |
| ~. | Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Kalurahan secara Partisipatif | 10 | | x | x | x | x | x | x | x | x | kalurahan | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 147.382.800 | DD | swakelola | |
| ~. | Pendataan Potensi Budaya Kalurahan | 17,18 | | | | | | | | x | x | kalurahan | | | | | | | | | x | x | 49.100.000 | DD,BKP | swakelola | | |
| ~. | Pengelolaan Aplikasi E-Human Developmant Worker | 17 | | | | | x | x | x | x | x | kalurahan | | | | | | x | x | x | x | x | 7.400.000 | DD | swakelola | | |
| ~. | Penyusunan / Pendataan / Pemutakhiran Data Monografi Kalurahan | 17 | | | | | | | | | | kalurahan | | x | | | | | | | | | 11.790.000 | DD | swakelola | | |
| ~. | Lain-lain Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Capil, Statistik dan Kearsipan | | | x | | | | | | | | kalurahan | | | x | | | | | | | | 27.900.000 | DD,ADD,BH | swakelola | | |
| 4. Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ~. | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Kalurahan/Pembahasan APBDes (Reguler) | 17 | | x | x | x | x | x | x | x | x | kalurahan | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 189.856.300 | DD,ADD,BH | swakelola | |
| ~. | Penyelenggaraan Musywaran Kalurahan Lainnya (Musdus, rembug Kalurahan Non Reguler) | 17,18 | | x | x | x | x | x | x | x | x | kalurahan | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 82.269.200 | DD,ADD,BH | swakelola | |
| ~. | Penyusunan Dokumen Perencanaan Kalurahan (RPJMKalurahan/RKPKalurahan dll) | 17 | | x | x | | x | x | x | x | x | kalurahan | | | x | x | x | | x | x | x | x | x | 108.222.000 | DD,ADD,BH | swakelola | |
| ~. | Penyusunan Dokumen Keuangan Kalurahan (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll) | 17 | | x | x | | x | x | x | x | x | kalurahan | | | x | x | x | | x | x | x | x | x | 178.507.000 | DD,ADD,BH | swakelola | |
| ~. | Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Kalurahan | 17 | | | | x | x | x | | x | x | kalurahan | | | x | - | | x | x | x | | x | x | 36.210.900 | PAD,ADD,BH | swakelola | |
| ~. | Penyusunan Kebijakan Kalurahan (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan) | 17,18 | | x | x | x | x | x | x | x | x | kalurahan | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 173.362.000 | DD,ADD,BH | swakelola | |
| ~. | Penyusunan Laporan Lurah, LPPKalurahan dan Informasi Kepada Masyarakat | 17,18 | | | | x | x | x | x | x | x | kalurahan | | | x | - | | x | x | x | x | x | x | 50.498.000 | PAD,ADD,BH | swakelola | |
| ~. | Pengembangan Sistem Informasi Kalurahan | 17,18 | | x | x | x | x | x | x | x | x | kalurahan | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | 54.604.000 | DD,ADD,BH | swakelola | |
| ~. | Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Kalurahan | 17,18 | | | x | | | | x | x | x | kalurahan | | | x | | x | | | | x | x | x | 24.029.000 | DD,ADD,BH | swakelola | |
| ~. | Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & Bamuskal | 17 | | x | x | | x | x | x | | x | kalurahan | | | x | x | x | | x | x | x | | x | 476.640.550 | ADD,BHP,BH | swakelola | |
| ~. | Penyelenggaran Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dim Lomdes | 17 | | | | | | | | | x | x | kalurahan | | | x | | | | | | | x | x | 39.300.000 | ADD,BHP,BH | swakelola |
| ~. | Dukungan dan Sosialisasi Pengisian Pamong dan Staf Honorer | 17,18 | | | | | | | | | | kalurahan | | | x | | | | | | | | | 29.770.000 | ADD,PBH | swakelola | |
| 5. Sub Bidang Pertanahan . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ~. | Sertifikasi Tanah Kas Kalurahan | 17,18 | | | | x | | x | | x | x | kalurahan | | | | | | x | | x | | x | x | 18.885.200 | PAD,ADD,BH | swakelola | |
| ~. | Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan) | 17,18 | | | | | x | | | x | x | kalurahan | | | x | | | | x | | | x | x | 23.465.000 | PAD,ADD,BH | swakelola | |
| ~. | Kegiatan Mediasi Konflik Pertanahan | 16 | | | | x | | x | x | x | x | kalurahan | | | | | | x | | x | x | x | x | 10.065.000 | PAD,ADD,BH | swakelola | |
| ~. | Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) | 17,18 | | x | x | x | x | x | x | x | x | kalurahan | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 202.300.000 | PAD,ADD,BH | swakelola | |
| ~. | Penentuan/Penegasan Batas/patok Tanah Kas Kalurahan | 16 | | | | | x | | | | | kalurahan | | | | | | | x | | | | | 3.860.000 | PAD,ADD,BH | swakelola | |

| No | Bidang / Sub Bidang/ Kegiatan | Mendukung SDGs Desa Ke | Data Existing | Target Capaian Tahun ke 1-8 | | | | | | | | Lokasi (RT/RW/ Dusun) | Perkiraan Volume & Satuan | Sasaran/ Manfaat | Waktu Pelaksanaan Tahun ke | | | | | | | | Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan | | Perkiraan Pola Pelaksanaan | | |
|---|---|------------------------|---------------|-----------------------------|---|---|---|---|---|---|---|-----------------------|---------------------------|------------------|----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|---------------------------------------|---------------|----------------------------|-----------|-----------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Jumlah (Rp) | | Sumber | |
| | | | | e | f | g | h | i | j | k | l | | | | p | q | r | s | t | u | v | w | x | | | | y |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z | aa | |
| II. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN Kalurahan . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Sub Bidang Pendidikan . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ~. | Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Kalurahan (Honor, Pakaian dll) | 4 | | x | x | x | x | x | x | x | x | 9 ped. | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 484.857.500 | DD,BMP | swakelola |
| ~. | Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst) | 4 | | x | | x | | x | | | x | 9 ped. | | | | x | | | x | | | | x | 59.870.000 | DD | swakelola | |
| ~. | Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat | 4 | | | x | | x | x | | | x | 9 ped. | | | | | x | | x | | | | x | 27.060.000 | DD | swakelola | |
| ~. | Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar Milik Kalurahan | 4 | | x | x | | | | | | | | | | | x | x | | | | | | | 1.125.000 | DD | swakelola | |
| ~. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/M | 4 | | x | x | x | x | x | x | x | x | 9 ped. | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | 1.516.405.150 | DD,BMP | swakelola | |
| ~. | Pengelolaan Perpustakaan Milik Kalurahan (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca) | 4 | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | 4.050.000 | DD | swakelola | |
| ~. | Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar | 4 | | | | | | | | | x | x | | | | | | | | | | x | x | 9.975.000 | DD | swakelola | |
| ~. | Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi | 4 | | | | | | x | x | x | x | 9 ped. | | x | | | | | x | x | x | x | | 18.815.000 | DD | swakelola | |
| ~. | Pendampingan Psikologis Siswa dan Orang Tua | 4 | | | | x | x | x | | | | | | | | | | x | x | x | | | | 12.640.000 | DD | swakelola | |
| 2. Sub Bidang Kesehatan . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ~. | Penyelenggaraan Pos Kesehatan Kalurahan/Polindes Milik Kalurahan (obat, Insentif, KB, dsb) | 3 | | x | x | x | x | x | x | x | x | kalurahan | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 33.465.500 | DD,PAD,BH | swakelola |
| ~. | Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) | 1,2,3 | | x | x | x | x | x | x | x | x | 9 ped. | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 927.717.000 | DD | swakelola | |
| ~. | Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll) | 3 | | x | | | | | x | | x | kalurahan | | x | x | | | | | x | | | x | 46.281.800 | DD | swakelola | |
| ~. | Penyelenggaraan Kalurahan Siaga Kesehatan | 3 | | x | x | | | x | x | x | x | kalurahan | | | x | x | | | x | x | x | x | | 55.380.000 | DD | swakelola | |
| ~. | Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) | 3 | | x | x | | | x | | | x | kalurahan | | | x | x | | | x | | | | x | 18.220.000 | DD | swakelola | |
| ~. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/PrasaranaPosyandu/Polindes/PKD ** | 3 | | | | | x | x | x | x | x | 9 ped. | | | x | | | | x | x | x | x | x | 746.056.000 | DD,BMP | swakelola | |
| ~. | Fasilitasi Penyelenggaraan Pos Binaan Terpadu (POSBINDU) | 1,2,3 | | | | x | x | x | x | x | x | 9 ped. | | | x | | | x | x | x | x | x | x | 130.061.185 | DD | swakelola | |
| ~. | Pengelolaan Rumah Kalurahan Sehat | 3 | | | | x | x | | | | | kalurahan | | | x | | | x | x | | | | | 22.700.000 | DD | swakelola | |
| ~. | Pembinaan Kampung KB | 3 | | | | x | x | x | x | x | x | kalurahan | | | x | | | x | x | x | x | x | x | 46.206.000 | DD | swakelola | |
| ~. | Penanganan / Pemulihan Balita Gizi Buruk / Stunting | 1,2,3 | | | | | | x | x | x | x | | | | | | | | x | x | x | x | | 92.415.000 | DD,BMP | swakelola | |
| ~. | Pendampingan Ibu Hamil Kekurangan Gizi Kronis / Resiko Tinggi Dan Nifas | 1,2,3 | | | | | | x | x | x | x | kalurahan | | | x | | | | | x | x | x | x | 134.721.000 | DD,BMP | swakelola | |

| No | Bidang / Sub Bidang/ Kegiatan | Mendukung SDGs Desa Ke | Data Existing | Target Capaian Tahun ke 1-8 | | | | | | | | Lokasi (RT/RW/ Dusun) | Perkiraan Volume & Satuan | Sasaran/ Manfaat | Waktu Pelaksanaan Tahun ke | | | | | | | | | | Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan | | Perkiraan Pola Pelaksanaan |
|----|---|------------------------|---------------|-----------------------------|---|---|---|---|---|---|---|-----------------------|---------------------------|------------------|----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------------|---------------|---------------------------------------|------------|----------------------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Jumlah (Rp) | Sumber | | |
| | | | | e | f | g | h | i | j | k | l | | | | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z | | |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z | aa | |
| ~. | Gerakan Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan (PSN,DII) | 3 | | | | x | x | x | x | x | x | kalurahan | | | x | | | x | x | x | x | x | x | 69.240.000 | DD | swakelola | |
| ~. | Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan | 3 | | x | | | | | | | | kalurahan | | | | x | | | | | | | | 1.200.000 | DD | swakelola | |
| 3. | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ~. | Pemeliharaan Jalan Usaha Tani | 1,2,8,9, | | | | | x | | x | x | x | 9 ped. | | | | | | | x | | x | x | x | 585.930.000 | DD,BKK,BK | Pswakelola | |
| ~. | Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Kalurahan | 8,9, | | x | | | | | | | | kalurahan | | | | x | | | | | | | | 46.308.500 | PAD,PBH | swakelola | |
| ~. | Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Kalurahan | 8,9, | | x | | | | | | | | kalurahan | | | | x | | | | | | | | 28.349.000 | PAD,ADD,PE | swakelola | |
| ~. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Kalurahan **) | 8,9,11 | | | | x | | | | | | | | | | | | x | | | | | 74.296.000 | DD,BKK,BK | Pswakelola | | |
| ~. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **) | 8,9,11 | | x | x | x | x | x | x | x | x | 9 ped. | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 4.079.473.500 | DD,BKK,BK | Pswakelola | |
| ~. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **) | 8,9, | | | | | | | x | | x | 9 ped. | | | | | | | | | x | | x | 237.426.000 | DD,BKK,BK | Pswakelola | |
| ~. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Kalurahan **) | 8,9, | | | | | x | | | | | 9 ped. | | | | | | | x | | | | | 341.338.000 | DD,BKK,BK | Pswakelola | |
| ~. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Kalurahan (Gorong, selokan dll) | 8,9, | | x | x | x | | x | x | x | x | 9 ped. | | | x | x | x | x | | x | x | x | x | 1.709.751.905 | DD,BKK,BK | Pswakelola | |
| ~. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Kalurahan/Situs Bersejarah Milik Kalurahan/Petilasan | 8,9, | | | | x | | | | | x | x | | | | | | x | | | | x | x | 16.343.000 | PAD,ADD,PE | swakelola | |
| ~. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Kalurahan **) | 8,9, | | | | | x | | | | x | | | | | | | | x | | | x | | 89.480.000 | AD,ADD,PBH | swakelola | |
| 4. | Sub Bidang Kawasan Pemukiman . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ~. | Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN | 1,2,3 | | x | | | x | x | x | x | x | 9 ped. | | | | | x | | | x | x | x | x | 153.271.000 | DD,BKK,BK | Pswakelola | |
| ~. | Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Kalurahan (Mata Air, Penampung Air, Sumur Bor dll) | 6 | | | x | | | | x | x | x | 9 ped. | | | | | x | | | | x | x | x | 112.978.000 | DD,BKK,BK | Pswakelola | |
| ~. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan **) | 6 | | x | | | | | | | | 9 ped. | | | x | x | | | | | | | | 7.093.800 | DD,BKK,BK | Pswakelola | |
| ~. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Kalurahan **) | 6 | | x | x | | | | | | | 9 ped. | | | x | x | x | | | | | | | 423.790.500 | DD,BKK,BK | Pswakelola | |
| ~. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman **) | 3,6,11 | | | | | x | | | | x | x | | | | | | | x | | | x | x | 86.625.000 | DD,BKK,BK | Pswakelola | |
| ~. | Pembangunan taman/rehabilitasi/pemeliharaan taman | 11 | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | 14.376.000 | DD,BKK,BK | Pswakelola | |
| 5. | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ~. | Pelatihan Pengelolaan / Pengelolaan Sampah | 12,13 | | | | x | x | x | x | x | x | 9 ped. | | | x | | | x | x | x | x | x | x | 190.562.950 | DD,BMP,BK | Kswakelola | |
| ~. | Penyediaan Prasarana Pengolahan Sampah | 12,13 | | | | | | | | x | x | 9 ped. | | | | | | | | | x | x | x | 181.190.000 | DD,BMP,BK | Kswakelola | |
| 6. | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Bidang / Sub Bidang/ Kegiatan | Mendukung SDGs Desa Ke | Data Existing | Target Capaian Tahun ke 1-8 | | | | | | | | Lokasi (RT/RW/ Dusun) | Perkiraan Volume & Satuan | Sasaran/ Manfaat | Waktu Pelaksanaan Tahun ke | | | | | | | | Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan | | Perkiraan Pola Pelaksanaan | |
|---|--|------------------------|---------------|-----------------------------|---|---|---|---|---|---|---|-----------------------|---------------------------|------------------|----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|---------------------------------------|-------------|----------------------------|------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Jumlah (Rp) | | Sumber |
| | | | | e | f | g | h | i | j | k | l | | | | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | | z |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z | aa |
| ~. | Penyelenggaraan Informasi Publik Kalurahan (Poster, Baliho dll) | 18 | | x | x | x | x | x | x | x | x | kalurahan | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 87.803.850 | DD | swakelola |
| ~. | Pembangunan/Peningkatan/Pengadaan Sarana Penerangan Jalan | 8,9 | | | | x | | x | | | | 9 ped. | | | | | | x | | x | | | 48.000.000 | DD,BKK,BK | Pswakelola | |
| 9. | Sub Bidang Pariwisata . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ~. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik **) | 8,9,11 | | x | | | | | | | | kalurahan | | | x | | | | | | | | 319.777.500 | DD,BKK,BK | Pswakelola | |
| ~. | Pengembangan Pariwisata Tingkat Kalurahan | 8,9,11 | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | x | 100.000.000 | PBP | swakelola | |
| III. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ~. | Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Kalurahan | 12,16 | | x | | | x | x | x | x | x | kalurahan | | | | x | | | x | x | x | x | x | 45.481.000 | AD,ADD,BKK | swakelola |
| ~. | Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes | 16,18 | | x | x | x | x | x | x | x | x | kalurahan | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 230.366.000 | DD,BKK,BK | Pswakelola |
| ~. | Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Kalurahan | 16,18 | | x | x | | x | x | x | x | x | kalurahan | | | x | x | x | | x | x | x | x | x | 143.370.000 | DD,BKK,BK | Pswakelola |
| ~. | Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Kalurahan | 16 | | x | x | | | | | | | kalurahan | | | x | x | x | | | | | | | 36.453.500 | DD,BKK,BK | Pswakelola |
| ~. | Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Kalurahan | 16 | | | | x | | | | | | kalurahan | | | | | | x | | | | | | 6.870.000 | DD,BKK,BK | Pswakelola |
| ~. | Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Pelindungan Masy. | 16,18 | | x | | | | | | | | kalurahan | | | | x | | | | | | | | 1.540.000 | DD | swakelola |
| ~. | Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) | 16,18 | | | | x | | x | x | x | x | kalurahan | | | | | | x | | x | x | x | x | 24.740.000 | DD | swakelola |
| ~. | Penguatan Kalurahan Aman Covid-19/Kalurahan Tangguh Bencana | 13,16 | | | | x | x | | | | | kalurahan | | | | | | x | x | | | | | 170.111.450 | DD | swakelola |
| ~. | Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap NAPZA tingkat Kalurahan | 3,16 | | | | | | | | | x | x | | | | | | | | | | x | x | 21.880.000 | DD | swakelola |
| 2. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ~. | Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Kalurahan | 18 | | | | x | | x | | x | x | | | | | | | x | | x | | x | x | 31.890.000 | DD | swakelola |
| ~. | Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Kalurahan tkt. Kec/Kab/Kot) | 18 | | | | | x | x | | x | x | kalurahan | | | | | | | x | x | | x | x | 7.130.000 | DD | swakelola |
| ~. | Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Kegamaan dll) | 18 | | x | x | x | x | x | x | x | x | kalurahan | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 446.483.000 | DD | swakelola |
| ~. | Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Kegamaan Milik Kalurahan | 18 | | x | | | | | | | | | | | x | x | | | | | | | | 55.489.000 | DD | swakelola |
| ~. | Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Kegamaan Milik Kalurahan **) | 18 | | | | x | | | | | | 9 ped. | | | | | | x | | | | | | 7.490.000 | DD | swakelola |

| No | Bidang / Sub Bidang/ Kegiatan | Mendukung SDGs Desa Ke | Data Existing | Target Capaian Tahun ke 1-8 | | | | | | | | Lokasi (RT/RW/ Dusun) | Perkiraan Volume & Satuan | Sasaran/ Manfaat | Waktu Pelaksanaan Tahun ke | | | | | | | Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan | | Perkiraan Pola Pelaksanaan | | | |
|-----|---|------------------------|---------------|-----------------------------|---|---|---|---|---|---|---|-----------------------|---------------------------|------------------|----------------------------|------|------|------|------|------|------|---------------------------------------|------------|----------------------------|-------------|-----------|-----------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | Jumlah (Rp) | Sumber | |
| | | | | e | f | g | h | i | j | k | l | | | | p | q | r | s | t | u | v | w | x | | | | y |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z | aa | |
| ~ . | Pembinaan Bidang Keagamaan | 18 | | x | | x | x | x | x | x | x | | | | x | x | | x | x | x | x | x | x | 204.957.700 | DD | swakelola | |
| ~ . | Pembinaan/Pengembangan Adat, Seni dan Tradisi | 18 | | | | | | | | | x | x | | | | | | | | | x | x | 73.790.000 | DD | swakelola | | |
| ~ . | Pengembangan Desa Budaya | 18 | | | | | | | | x | x | | | | | | | | | | x | | x | 18.205.000 | DD | swakelola | |
| 3. | Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ~ . | Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Kalurahan tkt Kec/Kab/Kota | 16,18 | | x | | | | x | x | x | x | kalurahan | | | x | | | | | x | x | x | x | 38.009.000 | DD | swakelola | |
| ~ . | Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olaraga Tingkat Kalurahan | 16,18 | | | | | | | x | | x | kalurahan | | | x | | | | | | x | | x | 34.914.000 | DD | swakelola | |
| ~ . | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Kalurahan | 16,18 | | | | | | | x | x | x | kalurahan | | | x | | | | | | x | x | x | 107.092.000 | DD | swakelola | |
| ~ . | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Kalurahan | 9,16,18 | | | x | | | | | | x | | | | | x | | | | | | | x | 164.368.000 | DD,PBP | swakelola | |
| ~ . | Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Kalurahan | 16,18 | | x | | | | x | x | x | x | kalurahan | | | x | x | | | | | x | x | x | x | 32.175.000 | DD | swakelola |
| 4. | Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ~ . | Pembinaan LKMD/LPM/LPMD | 18 | | x | x | x | x | x | x | x | x | kalurahan | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 64.915.500 | DD | swakelola | |
| ~ . | Pembinaan PKK | 18 | | x | x | x | x | x | x | x | x | kalurahan | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 122.988.000 | DD | swakelola | |
| ~ . | Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan | 18 | | | x | x | x | x | | | x | kalurahan | | | x | | x | x | x | | | | x | 32.555.000 | DD | swakelola | |
| ~ . | Pembinaan/Peningkatan Kapasitas Lembaga Kebudayaan Kalurahan | 18 | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | x | - | PBK | | |
| ~ . | Pembentukan LKK | 18 | | | | | | | | | x | kalurahan | | | | | | | | | | x | | 3.900.000 | DD | swakelola | |
| ~ . | Pelatihan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kalurahan | 18 | | | | | | | x | x | | kalurahan | | | | | | | | | x | x | | 12.714.000 | DD | swakelola | |
| IV. | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ~ . | Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Kalurahan | 1,2,3,6 | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | x | 50.000.000 | DD | swakelola | |
| ~ . | Bimtek/Pelatihan/Pengenalan TTG untuk Perikanan Darat/Nelayan **) | 1,2,3,6 | | | | | | | | | x | kalurahan | | | | | | | | | | | x | 10.000.000 | DD | swakelola | |
| ~ . | Bimtek/Pelatihan/Pengembangan Usaha Pengolahan Ikan | 1,2,3,6 | | | | | | | | | x | kalurahan | | | | | | | | | | | x | 5.000.000 | DD | swakelola | |
| 2. | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ~ . | Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Kalurahan (Lumbung Kalurahan dll) | 1,2,3,6 | | | | | | x | x | x | x | kalurahan | | | | | | | | x | x | x | x | 101.513.000 | DD | swakelola | |
| ~ . | Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana | 1,2,3,6 | | | | x | | | | | | | | | | | | x | | | | | 19.557.000 | DD | swakelola | | |
| ~ . | Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan | 3,4,6,7 | | | | x | x | | | | | | | | | | | x | x | | | | 89.541.000 | DD | swakelola | | |
| ~ . | Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana | 3,6,8 | | | | x | | | | | | | | | | | | | | x | | | 41.390.000 | DD | swakelola | | |
| ~ . | Pelatihan Pengolahan Hasil Pertanian/Peternakan/ Pasca Panen | 3,4,6,7 | | | | | | x | | | | kalurahan | | | | | | | | | x | | | 6.830.000 | DD | swakelola | |

| No | Bidang / Sub Bidang/ Kegiatan | Mendukung SDGs Desa Ke | Data Existing | Target Capaian Tahun ke 1-8 | | | | | | | | Lokasi (RT/RW/ Dusun) | Perkiraan Volume & Satuan | Sasaran/ Manfaat | Waktu Pelaksanaan Tahun ke | | | | | | | | Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan | | Perkiraan Pola Pelaksanaan | | |
|--|---|------------------------|---------------|-----------------------------|---|---|---|---|---|---|---|-----------------------|---------------------------|------------------|----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|---------------------------------------|-------------|----------------------------|-------------|-----------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Jumlah (Rp) | | Sumber | |
| | | | | e | f | g | h | i | j | k | l | | | | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | | z | aa |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z | aa | |
| 3. | Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Kalurahan . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ~ . | Peningkatan Kapasitas Perangkat Kalurahan | 18 | | x | | x | x | | x | | | kalurahan | | | x | x | | x | x | | x | | | 86.782.000 | PAD,ADD | swakelola | |
| ~ . | Peningkatan Kapasitas Bamuskal | 18 | | | | | | | x | x | | kalurahan | | | | | | | | x | x | | | 3.090.000 | ADD | swakelola | |
| ~ . | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Administrasi Desa | 18 | | | | | | | | x | | kalurahan | | | | | | | | | x | | | 8.910.000 | PBP | swakelola | |
| 4. | Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ~ . | Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan | 3.4,5 | | | | | | | | x | x | kalurahan | | | | | | | | | x | x | | 6.000.000 | DD,BKP | swakelola | |
| ~ . | Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak | 3.4,5 | | x | | x | x | x | | | x | kalurahan | | | x | x | | x | x | | | | x | 71.624.000 | DD | swakelola | |
| ~ . | Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas) | 3.4,5 | | x | | x | x | x | | | x | kalurahan | | | x | x | | x | x | | | | x | 45.467.000 | DD | swakelola | |
| ~ . | Penyelenggaraan Kalurahan Inklusif | 5 | | | | | | x | | | | kalurahan | | | | | | | | x | | | | 3.690.000 | DD | swakelola | |
| ~ . | Pelatihan Kerja (Live Skill) bagi Ibu Rumah Tangga/Remaja Belum Bekerja/Keluarga | 3.4,5 | | | | x | | x | | | x | kalurahan | | | | | x | | | | | | x | 46.379.500 | DD,BKP | swakelola | |
| ~ . | Pembinaan/Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Usia Dini | 5 | | | | | | | | | x | kalurahan | | | | | | | | | | | x | 4.900.000 | DD | swakelola | |
| 5. | Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM) . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ~ . | Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM | 8, 10 | | | | | | x | x | x | x | kalurahan | | | x | | | | | | x | x | x | x | 34.939.000 | DD | swakelola |
| ~ . | Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi | 8, 10 | | | | | | x | | | x | kalurahan | | | | | | | | | x | | | x | 443.560.000 | DD,BKP | swakelola |
| ~ . | Pengadaan Teknologi Tepat Guna Untuk Pengembangan Ekonomi PeKalurahanan Non Pertanian | 6,8,9 | | | | | | | | x | x | x | kalurahan | | | | | | | | | x | x | x | 9.550.000 | DD | swakelola |
| 6. | Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ~ . | Pembentukan BUM Kalurahan (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMKalurahan) | 8, 10 | | x | | | | | | | | kalurahan | | | | | x | | | | | | | | 16.610.000 | DD | swakelola |
| ~ . | Pelatihan Pengelolaan BUM Kalurahan (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes) | 8, 10 | | | x | | | x | | x | x | kalurahan | | | | | x | | | | x | | x | x | 7.225.000 | DD | swakelola |
| 7. | Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ~ . | Pemeliharaan Pasar Kalurahan/Kios Milik Kalurahan | 8, 10 | | x | | | | | | | x | x | Pancuran | | | | | | | | | | x | x | 207.910.000 | DD | swakelola |
| ~ . | Pembangunan/Rehab Pasar Kalurahan/Kios Milik Kalurahan | 8, 10 | | x | | | x | x | | | x | Pancuran | | | | | x | | | x | x | | | x | 287.529.300 | DD | swakelola |
| ~ . | Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif | 8, 10 | | | x | | | x | x | x | x | kalurahan | | | x | | x | | | | x | x | x | x | 39.972.800 | DD,BKP | swakelola |
| V. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK KALURAHAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Sub Bidang Penanggulangan Bencana | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ~ . | Sarana Prasarana Tanggap Darurat | | | x | x | x | x | x | x | x | x | kalurahan | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 122.053.000 | DD,DD,PBH,E | swakelola |
| 3. | Sub Bidang Keadaan Mendesak | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ~ . | Bantuan Langsung Tunai (BLT) | 1 | | | x | x | x | x | x | x | x | kalurahan | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | 1.315.394.760 | DD | swakelola |

| No | Bidang / Sub Bidang/ Kegiatan | Mendukung SDGs Desa Ke | Data Existing | Target Capaian Tahun ke 1-8 | | | | | | | | Lokasi (RT/RW/ Dusun) | Perkiraan Volume & Satuan | Sasaran/ Manfaat | Waktu Pelaksanaan Tahun ke | | | | | | | | Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan | | Perkiraan Pola Pelaksanaan | |
|-----|--------------------------------|---------------------------|------------------|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|-----------------------------|---------------------------------|---------------------|----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|--|-------------|----------------------------------|-----------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Jumlah (Rp) | | Sumber |
| | | | | e | f | g | h | i | j | k | l | | | | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | | z |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z | aa |
| VI. | PEMBIAYAAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ . Penyertaan Modal Kalurahan | | | x | x | | | x | | x | | kalurahan | | | | x | x | | | x | | x | | 316.202.200 | DD | swakelola |

TOTAL 32.484.538.476

Mengetahui:
Lurah Terong

Terong, Mei 2025
Disusun Oleh Tim Penyusun Perubahan
RPJM Kalurahan
Ketua,

SUGIYONO, S.E

VINA ARYANI, S.Pd



DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN YANG MASUK KE
KALURAHAN TERONG KAPANEWON DLINGO KABUPATEN BANTUL

| No | Program/ Kegiatan | SKPD Pengelola Program/ Kegiatan | Lokasi Kegiatan | Volume dan Satuan | Pagu Dana (Rp.) |
|----|---|---|--|-------------------------|--------------------|
| 1 | Irigasi | PU ESDM DIY | Punthuk | 1 paket | 195.000.000 |
| 2 | Pengerasan jalan | PU ESDM DIY | Pinus Pengger, Watu Gede - Pancuran Sendang-Pancuran | 3 lokasi | 175.000.000 |
| 3 | Showroom & rumah produksi desa prima | P3A DIY | Pancuran | 1 unit | 400.000.000 |
| 4 | PJU | DISHUB KAB | Rejosari, Ngenep | 10 titik | 200.000.000 |
| 5 | PJU | DISHUB KAB | Ngenep | 3 titik | 45.000.000 |
| 6 | PJU | DISHUB KAB | Pancuran, RT 04 | 7 titik | 140.000.000 |
| 7 | PK Pengembangan Potensi Desa Perubahan 2 | PU DIY | Ngenep | 16,56 m3 | 55.000.000 |
| 8 | PK Pengembangan Potensi Desa Perubahan 2 | PU DIY | Pencitrejo | 19,46 m3 | 55.000.000 |
| 9 | PK Infrastruktur BKK Paket 100 juta | PU Kab | Kebokuning, RT 04 | 62,96 m3 | 100.000.000 |
| 10 | PK Infrastruktur BKK Paket 100 juta | PU Kab | Pancuran, RT 02 | 53,91 m3 4,23 m3 | 100.000.000 |
| 11 | PK Infrastruktur BKK Paket 100 juta | PU Kab | Sendangsari, RT 02 & RT 04 | 59,69 m3 | 100.000.000 |
| 12 | PK Infrastruktur BKK Paket 100 juta | PU Kab | Terong I, RT 02 | 63,02 m3 | 100.000.000 |
| 13 | PK Infrastruktur APBD | PU Kab | Terong I, RT 02 | 53,48 m3 | 100.000.000 |
| 14 | PK Pengembangan Potensi Desa Tahap 1 | PU DIY | Terong I, RT 02 | 16,56 m3 | 55.000.000 |
| 15 | PK Pengembangan Potensi Desa Tahap 1 | PU DIY | Pencitrejo, RT 01 | 16,56 m3 | 55.000.000 |
| 16 | PK Infrastruktur BKK Paket 100 juta | PU Kab | Pencitrejo, RT 01 | 53,5 m3 | 100.000.000 |
| 17 | PK Infrastruktur BKK Paket 100 juta | PU Kab | Pencitrejo, RT 01 | 16,56 m3 | 100.000.000 |
| 18 | PK Infrastruktur BKK Paket 100 juta | PU Kab | Terong II, RT 02 | 29,39 m3 28,5 m3 | 100.000.000 |
| 19 | PK Infrastruktur BKK Paket 100 juta | PU Kab | Saradan, RT 02 & RT 05 | 53,5 m3 | 100.000.000 |
| 20 | Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Stempat Skala Individu | SPALDS | Kalurahan Terong | 25 m3 | 300.000.000 |
| 21 | Pengaspalan jln propinsi | PU ESDM DIY | Perempatan Tugu- Sendangsari | 2 km | 11 milyar |



KALENDER MUSIM
KALURAHAN TERONG KAPANEWON DLINGO KABUPATEN BANTUL

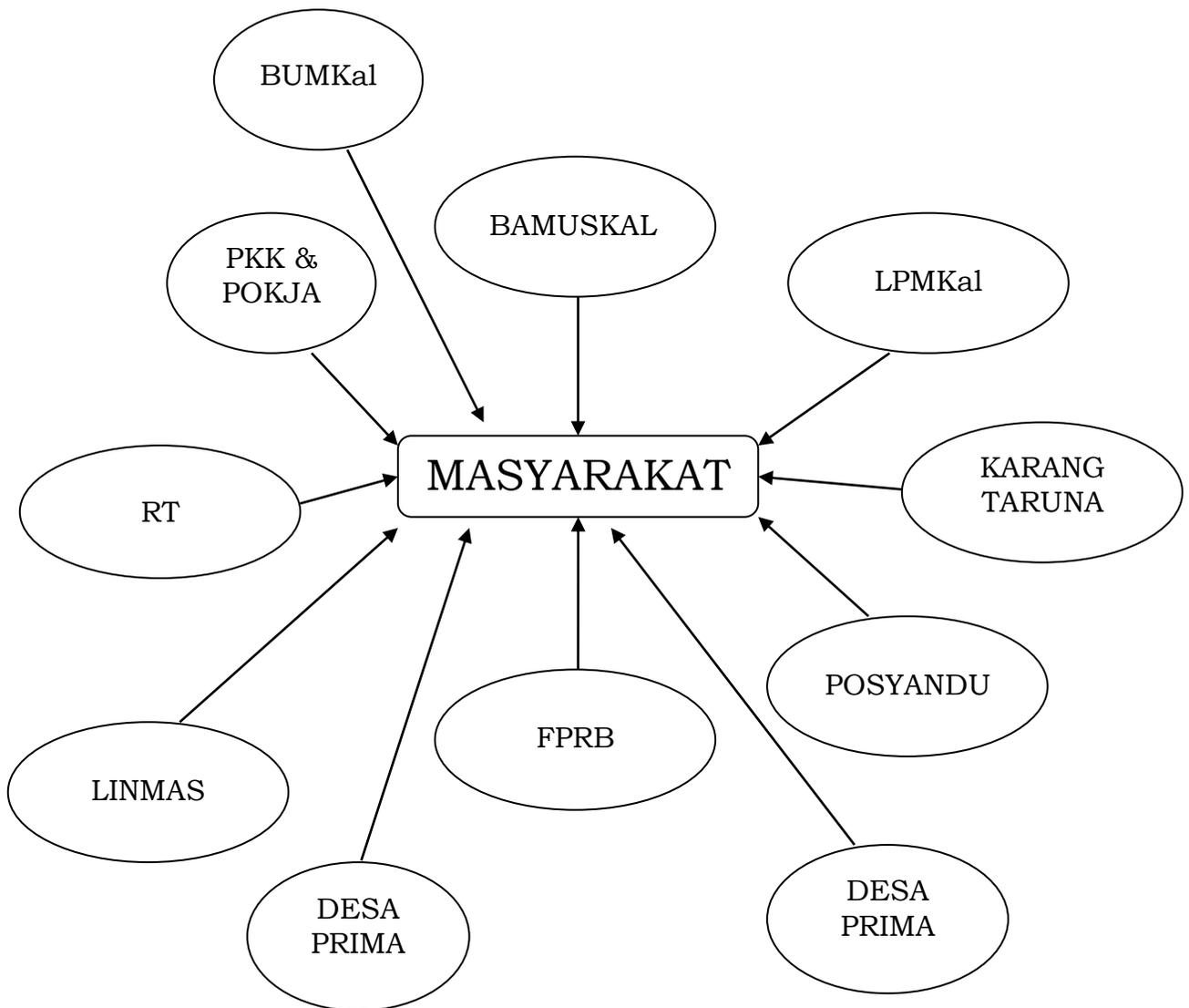
| Masalah/Kegiatan Keadaan | PANCARоба | | | KEMARAU | | | | | PENGHUJAN | | | |
|---|-----------|-----|-----|---------|-----|-----|-----|-----|-----------|-----|-----|-----|
| | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des |
| Warga terserang penyakit meriang | o | ooo | ooo | o | - | - | - | - | - | - | o | oo |
| Warga terserang penyakit DB | ooo | oo | oo | oo | o | - | - | - | - | oo | oo | ooo |
| Kekurangan air | - | - | - | - | - | oo | ooo | ooo | o | - | - | - |
| Musim Tanam | ooo | ooo | oo | oo | oo | o | o | o | o | oo | ooo | ooo |
| Musim Panen | o | ooo | ooo | oo | o | - | - | - | o | o | - | - |
| Tanah longsor Pohon tumbang Lahan pertanian kebanjiran | oo | oo | o | - | - | - | - | - | o | o | o | oo |

DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI KALENDER MUSIM

| No | MASALAH | POTENSI |
|----|--|--|
| 1 | Pada musim pancaroba warga terserang penyakit | × Puskesmas; × Posyandu; × Bidan Desa; × Kebun obat keluarga; |
| 2 | Di tiga pedukuhan pada musim kemarau kekurangan air bersih | × Mata air lain pedukuhan; × Biaya swadaya; × Tanki air; × Gotong royong; |
| 3 | Pada musim hujan terjadi tanah longsor dan pohon tumbang di Jalan cino Mati, jalan lingkungan dan pemukiman warga; | × Gotong-royong; × FPRB; × Peralatan mitigasi; |
| 4 | Persawahan kekurangan air | × Sungai/kali; × Sumur bor pertanian; × Pompa air; |
| 6 | Hama pada tanaman padi | × Obat-obatan pembasmi hama; × Sarpras pertanian; |
| 7 | Hama dari monyet/kera liar saat musim kemarau pada ladang pertanian pangan belum dapat ditangani | × Gotong royong; |



BAGAN KELEMBAGAAN
KALURAHAN TERONG KAPANEWON DLINGO KABUPATEN BANTUL



Tanda panah menunjukkan kedekatan dan pengaruh kelembagaan terhadap masyarakat.



DAFTAR MASALAH DAN POTENSI KELEMBAGAAN
KALURAHAN TERONG KAPANEWON DLINGO KABUPATEN BANTUL

| No | NAMA LEMBAGA | MASALAH | POTENSI |
|----|----------------------|--|---|
| 1 | Pemerintah Kalurahan | Telah berjalan baik, namun memiliki keterbarasan ruang sehingga satu ruang memiliki berbagai fungsi | × Aparatur lengkap; × Sarpras lengkap; |
| 2 | Bamuskal | Bamuskal aktif dalam musyawarah masih perlu bimbingan teknis | × Aparatur lengkap; × Sarpras lengkap; |
| 3 | LPMKal | Dalam partisipasi keikutsertaan dalam musyawarah belum optimal dan belum memiliki ruang sekretariat khusus | × Pengurus lengkap |
| 4 | PKK & POKJA | Pemanfaatan Buku adminitrasi belum optimal dan belum memiliki ruang sekretariat khusus | × Pengurus lengkap |
| 5 | RT | Partisipasi Kehadiran dalam rapat belum optimal | × RT lengkap; × Buku adminitrasi lengkap; |
| 6 | KARANG TARUNA | Kurang aktif dalam kegiatan di kalurahan | × Aktih di lingkungan padukuhan; × Pengurus lengkap; |
| 7 | LINMAS | partisipasi kehadiran dalam rapat/pertemuan belum maksimal | × pengurus lengkap; × sarpras lengkap; |
| 8 | FPRB | Tidak ada bimbingan teknis | × pengurus lengkap; × sarpras lengkap; |
| 9 | POSYANDU | Baru berjalan di tingkat wilayah/padukuhan | × kader lengkap; × sarpras lengkap; |
| 10 | BUMKal | Belum optimal dalam pemanfaatan peluang usaha, belum berbadan hukum | × baru proses pengisian pengelola; × sarpras lengkap; |
| 11 | KOPERASI MERAH PUTIH | Belum aktif | × pengurus, pengawas lengkap; × proses adminitrasi oleh notaris; |
| 12 | DESA PRENEUR | Belum memiliki sertifikasi BPOM dan Halal | × pengurus lengkap; × sarpras lengkap; |
| 13 | DESA PRIMA | Belum memiliki sertifikasi BPOM dan Halal | × pengurus lengkap; × sarpras lengkap; |



DAFTAR SUMBER DAYA MANUSIA
KALURAHAN TERONG KAPANEWON DLINGO KABUPATEN BANTUL

| No | Sumber Daya Manusia | Jumlah | Satuan |
|----|--|--------|--------|
| 1 | Penduduk dan keluarga | | |
| | a. Jumlah penduduk laki-laki | 2.894 | jiwa |
| | b. Jumlah penduduk perempuan | 2.859 | jiwa |
| | c. Jumlah keluarga | 2.049 | KK |
| 2 | Sumber penghasilan utama penduduk | | |
| | a. Pertanian, perikanan, perkebunan | 2.519 | jiwa |
| | b. Industri pengolahan (pabrik, kerajinan, dll) | 340 | jiwa |
| | c. Perdagangan besar/eceran dan rumah makan | 769 | jiwa |
| | d. Angkutan, pergudangan, komunikasi | 13 | jiwa |
| | e. Jasa | 50 | jiwa |
| | f. Lainnya (air, gas, konstruksi, perbankan, dll) | 101 | jiwa |
| 3 | Tenaga kerja berdasarkan latar belakang pendidikan | | |
| | a. Lulusan S-1 keatas | 135 | jiwa |
| | b. Lulusan D1-D2 | 66 | jiwa |
| | c. Lulusan SLA | 1.332 | jiwa |
| | d. Lulusan SMP | 1.188 | jiwa |
| | e. Lulusan SD | 1.495 | jiwa |
| | f. Tidak tamat SD/ tidak sekolah | 173 | jiwa |
| 4 | Angkatan Kerja | 3.425 | jiwa |
| 5 | Kepadatan Penduduk | 749,16 | /km |
| 6 | Kader Kesehatan | 132 | orang |
| 7 | Kader Pembangunan | 1 | orang |
| 8 | Kader Perlindungan Anak & Perempuan | 29 | orang |
| 9 | Kader Pendidikan | 47 | orang |
| 10 | Tenaga keamanan | 46 | orang |
| 11 | Relawan kebencanaan | 107 | orang |
| 12 | Kader lingkungan | 82 | orang |
| 13 | Omah jaga warga /Jaga warga | 185 | orang |

MASALAH DAN POTENSI SUMBER DAYA MANUSIA
KALURAHAN TERONG KAPANEWON DLINGO KABUPATEN BANTUL

| No | SUMBER DAYA MANUSIA | MASALAH | POTENSI |
|----|---------------------|--|--|
| 1 | Angkatan kerja | Angka pengangguran masih tinggi | × Sumber daya alam; |
| 2 | Relawan kebencanaan | Belum ada bimbingan teknis kebencanaan | × Sarpras lengkap; × Gotong royong; × Relawan; |
| 3 | Omah / jaga warga | Belum maksimal | × Gotong royong; × Swadaya; |
| 4 | Kader Kesehatan | Sarana prasarana belum maksimal | × Pendampingan dari puskesmas; |



DAFTAR SUMBER DAYA PEMBANGUNAN
KALURAHAN TERONG KAPANEWON DLINGO KABUPATEN BANTUL

| No | Sumber Daya Pembangunan | Jumlah | Satuan |
|----|---------------------------------------|--------|----------|
| 1 | Sawah | 144,80 | ha |
| 2 | Tegal | 521,65 | ha |
| 3 | Perkebunan | 86,40 | ha |
| 4 | Hutan | 426,00 | ha |
| 5 | Potensi Wisata | 8 | lokasi |
| 6 | Jalan propinsi | 7 | km |
| 7 | Jalan kabupaten | 16 | km |
| 8 | Jalan kalurahan | 9,8 | km |
| 9 | Jalan lingkungan | 36,6 | km |
| 10 | Jalan pertanian | 4,8 | km |
| 11 | Jembatan | 6 | unit |
| 12 | Irigasi | 2,7 | km |
| 13 | Embung/bendungan/dam | 6 | unit |
| 14 | Sungai/Kali | 7 | unit |
| 15 | Jaringan Internet/operator seluler | 8 | unit |
| 16 | Sumur Bor/PAM | 20 | unit |
| 17 | Sumur Gali | 750 | unit |
| 18 | Mata air/balik/sendang | 16 | titk |
| 19 | Lapangan Olah Raga | 3 | unit |
| 20 | Lapangan Volley | 3 | unit |
| 21 | Gedung Olah Raga | 1 | unit |
| 22 | Puskesmas | 1 | unit |
| 23 | Poskesdes | 1 | unit |
| 24 | Posyandu | 11 | unit |
| 25 | Posbindu | 9 | unit |
| 26 | Dokter/Bidan/Mantri Praktek/Klinik | 2 | unit |
| 27 | Tempat Persalinan | 2 | unit |
| 28 | Apotek | 2 | unit |
| 29 | Perpustakaan kalurahan | 1 | unit |
| 30 | PAUD/Kelompok Bermain/Play Group | 10 | unit |
| 31 | TPA/TPQ | 19 | unit |
| 32 | TK | 5 | unit |
| 33 | SD/MI | 4 | unit |
| 34 | SMP | 1 | unit |
| 35 | Pesantren | 1 | unit |
| 36 | Sanggar/Bimbingan Belajar | 4 | unit |
| 37 | Masjid/Mushola/Langgar | 39 | unit |
| 38 | Bank | 2 | unit |
| 39 | Koperasi | 5 | unit |
| 40 | Bumkal | 1 | unit |
| 41 | Pasar Tradisional | 1 | unit |
| 42 | Kios Kalurahan | 15 | unit |
| 43 | Pendopo/Gedung Pertemuan/Gedung Rapat | 11 | unit |
| 44 | Penggilingan Padi | 11 | unit |
| 45 | Perkantoran Kalurahan | 1 | kompleks |



DAFTAR MASALAH DAN POTENSI SUMBER DAYA PEMBANGUNAN
KALURAHAN TERONG KAPANEWON DLINGO KABUPATEN BANTUL

| No | SUMBER DAYA PEMBANGUNAN | MASALAH | POTENSI |
|----|-------------------------|--|---|
| 1 | Sawah | Tadah hujan, sehingga saat musim kemarau tidak ada ketersediaan air | × Kali/sungai; × Sumbur pertanian; × Pompa air pertanian; |
| 2 | Tegalan dan perkebunan | Tidak tergarap dengan maksimal, banyak lahan yang tidak digarap, emakin berkurangnya minat pemuda dalam usaha pertanian | × Taruna tani; × Tanah subur; |
| 3 | Hutan | Milik pemerintah kontribusi ke pemerintah kalurahan belum optimal | × Swadaya; |
| 4 | Potensi wisata | Keterbatasan dana kalurahan sehingga belum dapat melaksanakan pembangunan obyek wisata | × Sumber daya alam; |
| 5 | Jalan kabupaten | Kondisi jalan rusak, belum ada realisasi perbaikan dari pemerintah daerah, banyak jalan kalurahan tidak yang pindah status menjadi jalan kabupaten yang kondisinya rusak parah | × Gotong-royong; × Swadaya masyarakat; |
| 6 | Gedung Olah Raga | Kondisinya bangunan belum layak digunakan untuk olah raga, sarpras masih kurang | × Lokasi; |
| 7 | Lapangan | Kondisinya belum layak dan tidak standar untuk olah raga | × Tanah lapang; |
| 8 | Bumkal | Pemanfaatan lapangan usaha belum maksimal | × Sarpras lengkap; |
| 9 | Perpustakaan kalurahan | Pengguna/pengunjung tidak ada, belum ada ruang baca | × Koleksi buku; × Ruang perpus; |
| 10 | Pasar tradisional | Bangunan sudah perlu perbaikan, saat musim hujan banyak yang bocor | × Bangunan pasar; |
| 11 | Perkantoran Kalurahan | × Area kurang luas, sehingga ruangan memiliki beberapa fungsi; × ruang arsip terbatas, beberapa ruang yang seharusnya menjadi sekretariat LKK dijadikan gudang; | × Sarpras lengkap; |



DAFTAR SUMBER DAYA SOSIAL DAN BUDAYA
KALURAHAN TERONG KAPANEWON DLINGO KABUPATEN BANTUL

| No | Sosial Dan Budaya | Jumlah | Satuan |
|----|------------------------------|--------|----------|
| 1 | Situs budaya | 5 | situs |
| 2 | Festival kebudayaan | 10 | kegiatan |
| 3 | Kelompok kesenian | 27 | kelompok |
| 4 | Upacara Adat/Tradisi | 31 | kegiatan |
| 5 | Sanggar seni dan bahasa | 3 | kelompok |
| 6 | Gotong-royong/kerja-bhakti | 126 | kali/bln |
| 7 | Musyawarah kalurahan | 4 | kali/bln |
| 8 | Musyawarah padukuhan/wilayah | 51 | kali/bln |
| 9 | Acara keagamaan | 6 | kali/bln |
| 10 | Kegiatan olah raga | 4 | kali/bln |

DAFTAR MASALAH DAN POTENSI SUMBER DAYA SOSIAL DAN BUDAYA
KALURAHAN TERONG KAPANEWON DLINGO KABUPATEN BANTUL

| No | SOSIAL BUDAYA | MASALAH | POTENSI |
|----|------------------------------|--|--|
| 1 | Situs budaya | Sejarah situs jarang yang mengetahui | × Tempat terawat; × Masih sering dimanfaatkan |
| 2 | Festival kebudayaan | Volume pelaksanaan jarang dilaksanakan | × Rutin dilaksanakan; × Swadaya masyarakat; × gotong royong; × bantuan dari Pemerintah; |
| 3 | Kelompok kesenian | Sebagian telah vakum bahkan telah hilang karena tergerus perkembangan dan budaya luar yang masuk | × masih digunakan dalam upacara adat/tradisi; × swadaya masyarakat; × gotong-royong. |
| 4 | Upacara Adat/Tradisi | Sebagian adat/tradisi telah hilang dan tidak lagi dilaksanakan masyarakat karena tergerus budaya dari luar | × masih ada wilayah yang tetap menjaga dan melaksanakan; × swadaya masyarakat; × gotong-royong |
| 5 | Sanggar seni dan bahasa | Jumlah Peserta didik belum optimal | × Rutin dilaksanakan; × Swadaya masyarakat; × Bantuan pemerintah; |
| 6 | Gotong-royong/kerja-bhakti | Volume pelaksanaan terbatas | × Swadaya masyarakat; |
| 7 | Musyawarah kalurahan | Presentase kehadiran peserta belum optimal | × Sarpras lengkap; |
| 8 | Musyawarah padukuhan/wilayah | Presentase kehadiran peserta belum optimal | Sarpras lengkap; |
| 9 | Acara keagamaan | Presentase kehadiran peserta belum optimal | Sarpras lengkap; |
| 10 | Kegiatan olah raga | Tidak memiliki sarana olah raga yang presentatif/standar | × Lapangan; × Kelompok/grup olah raga; |



Sekretariat:

Jln. Patuk - Dlingo Km 7,5
Terong II, RT 04
Terong, Dlingo, Bantul, D.I Yogyakarta
55783

 terong-bantul.desa.id

 desa.terong@bantulkab.go.id

 0813 9143 7559

 0813 9143 7559  @kalurahan terong